

**SKRIPSI**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN  
DANA KELURAHAN DATA, KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**NURILA RAMADANI. U  
19.62202.067**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
2025**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA  
KELURAHAN DATA, KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**NURILA RAMADANI. U  
NIM 19.62202.067**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi  
(S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2025**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Nurila Ramadani. U

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.067

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.2893/In.39.8/PP.00.26/5/2025

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak, CTA., ACPA (....)

NIDN : 2003029203



Mengetahui:  
Dekan,  
Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag  
NIP. 197402082001122002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurila Ramadani. U

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.067

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Pembimbing : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.01/In.39.8/PP.00.9/01/2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA (Sekretaris)

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota)

Indrayani, S.e., M.Ak. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197102082001122002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta Ibunda (Hamriah) dan Ayahanda (Usman) serta kepada saudara-saudaraku (Sudirman Usman, Sitti Suaeba Usman dan Muh. Aqkmal) dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak, CTA., ACPA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kiyai Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rini Purnamasari, M.Ak Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak ,CTA., ACPA Selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terutama dosen Program Studi Akuntansi Syariah yang telah mengeluarkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.

6. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di IAIN Parepare.
8. Ibu Rabaisa, SH,M.M sebagai ibu lurah Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang
9. Semua teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2019 IAIN Parepare, terkhusus kepada teman-temanku yang bernama Rismayanti. S, Fatimah Az-zahra. N, Handayani, Sarmila. S, Nurfadhila, Syarifuddin, Dita Angreni dan semua teman-teman KKN.
10. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, melawan dirinya yang pemalu, *insecure* atau merasa kurang pada dirinya, seorang Perempuan sederhana dengan Impian tinggi. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Nurila Ramadani. U, anak ketiga yang dikenal dengan keras kepala, terimakasih telah bertahan sejauh ini dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terimakasih karena tetap kuat dan berani menjadi dirimu sendiri walaupun sering diremehkan, aku bangga atas setiap Langkah kecil yang kau ambil walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, rayakan apapun dalam dirimu. Aku berdoa semoga Langkah kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurila Ramadani. U  
Nim : 19.62202.067  
Tempat/Tgl. Lahir : Data, 24 November 2001  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Juni 2025  
Penulis



NURILA RAMADANI. U  
NIM. 19.62202.067



## ABSTRAK

**NURILA RAMADANI. U.** *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang.* (dibimbing oleh Bapak Zainal Said dan Ibu Andi Ayu Frihatni).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang. Responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat Kelurahan Data. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 99 responden dari 99 kuesioner yang disebar. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang di uji menggunakan SPSS versi 26.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, uji One Sampel T-test dengan responden masyarakat Kelurahan Data bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana kelurahan menunjukkan rata-rata sampel tidak berbeda secara signifikan dari nilai test value. *Kedua*, Hasil uji One Sampel T-test akuntabilitas (X1) diperoleh nilai 84% berada pada kategori sangat baik, transparansi (X2) diperoleh nilai 62% berada pada kategori sedang, partisipasi masyarakat (X3) diperoleh nilai 85% berada pada kategori sangat baik, pengelolaan dana kelurahan (Y) diperoleh nilai 81% berada pada kategori baik. *Ketiga* hasil uji Korelasi Product Moment pada akuntabilitas diperoleh nilai sebesar 0,503 menandakan bahwa terdapat hubungan positif dan cukup kuat antara akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan, pada transparansi diperoleh nilai sebesar 0,485 menandakan bahwa terdapat hubungan positif dan cukup kuat antara transparansi terhadap pengelolaan dana kelurahan, pada partisipasi masyarakat diperoleh nilai sebesar 0,602 menandakan bahwa terdapat hubungan positif dan kuat antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan. *Keempat* hasil uji Koefisien Determinasi bahwa variabel X terhadap variabel Y memiliki besaran pengaruh sebesar 40,8%. *Kelima*, uji T-parsial pada akuntabilitas (X1) diperoleh nilai sig. 0,009<0,05 artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel Y, transparansi (X2) diperoleh nilai sig. 0,312>0,05 artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel Y, partisipasi masyarakat diperoleh nilai sig. 0,000<0,05 artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hasil Uji Simultan-F diperoleh nilai F 21,833 dan sig. 0,000 ditemukan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana Kelurahan Data.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Dana Kelurahan

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori .....	11
C. Kerangka Pikir.....	34
D. Hipotesis .....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel.....	40

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Definisi Operasional Variabel .....	42
F. Instrumen Penelitian .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	45
H. Uji Hipotesis .....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	53
A. Karakteristik Responden.....	53
B. Distribusi Jawaban Responden.....	54
C. Pengujian Persyaratan Analisis Data .....	60
D. Uji Hipotesis .....	68
E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	82
BAB V PENUTUP.....	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	93
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS .....	XLVII

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Data	47
Tabel 4.1	Data Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	58
Tabel 4.2	Data Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel 4.3	Data Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	59
Tabel 4.4	Distribusi Jawaban Kuesioner Akuntabilitas	60
Tabel 4.5	Distribusi Jawaban Kuesioner Transparansi	61
Tabel 4.6	Distribusi Jawaban Kuesioner Partisipasi Masyarakat	62
Tabel 4.7	Distribusi Jawaban Kuesioner Pengelolaan Dana Kelurahan	64
Tabel 4.8	Hasil Uji Statistik Deskriptif	65
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas	68
Tabel 4.10	Hasil Uji Reliabilitas	69
Tabel 4.11	Hasil Uji Normalitas	70
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinearitas	71
Tabel 4.13	Hasil Uji Heterokedastisitas	73
Tabel 4.14	Hasil Uji One Sampel T-test Akuntabilitas	73
Tabel 4.15	Hasil Uji One Sampel T-test Transparansi	75

Tabel 4.16	Hasil Uji One Sampel T-test Partisipasi Masyarakat	76
Tabel 4.17	Hasil Uji One Sampel T-test Pengelolaan Dana Kelurahan	77
Tabel 4.18	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	78
Tabel 4.19	Hasil Uji Korelasi Pearson Product Moment	81
Tabel 4.20	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )	82
Tabel 4.21	Hasil Uji Parsial (uji t)	84
Tabel 4.22	Hasil Uji Simultan (uji F)	85
Tabel 4.23	Kesimpulan Hasil Regresi	86

**DAFTAR GAMBAR**

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Bagan Kerangka Pikir	41



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Data Kuesioner	IV
2	Surat Izin Penelitan Dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	IX
3	Surat izin penelitian dari dinas/PEMDA	X
4	Surat Keterangan telah meneliti dari instansi	XI
5	Surat Revisi Judul Skripsi	XII
6	Data hasil penelitian variabel akuntabilitas (X1)	XIII
7	Data hasil penelitian variabel tranparansi (X2)	XVI
8	Data hasil penelitian variabel partisipasi masyarakat (X3)	XIX
9	Data hasil penelitian variabel pengelolaan dana kelurahan (Y)	XXII
10	Analisis statistik deskriptif	XXV
11	Uji validitas akuntabilitas	XXVI
12	Uji validitas transparansi	XXVII
13	Uji validitas partisipasi masyarakat	XXVIII
14	Uji validitas pengelolaan dana kelurahan	XXIX
15	Uji reliabilitas	XXX
16	Uji normalitas	XXXI

17	Uji multikolinearitas	XXXII
18	Uji heterokedastisitas	XXXIII
19	Uji one sampel T-test	XXXIV
20	Uji regresi linear berganda	XXXV
21	Uji korelasi pearson product moment	XXXVI
22	Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )	XXXVI
23	Uji parsial (uji t)	XXXVIII
24	Uji simultan (uji F)	XXXIX
25	Nilai tingkat signifikan T tabel	XL
26	Nilai tingkat signifikan F tabel	XLI
27	Anggaran dan realisasi pengelolaan dana kelurahan data tahun 2022	XLII
28	Anggaran dan realisasi pengelolaan dana kelurahan data tahun 2023	XLIII
29	Anggaran dan realisasi pengelolaan dana kelurahan data tahun 2024	XLIV
30	Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Data	XLV



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhommah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَـيْ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يْـيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وْـوْ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta  
رَمَى : ramā  
قِيلَ : qīla  
يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَّةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah (bukan az-zalزالah)</i>
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*      بِاِلهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بدون	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة



بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga ditingkatkan di daerah sampai ke wilayah pedesaan dan kelurahan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam perkembangannya, telah berkembang menjadi sebagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan Sejahtera.<sup>1</sup>

Saat ini untuk mengatur setiap wilayah yang ada di Indonesia, pemerintah menerapkan sistem desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Secara umum desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus otonomi daerahnya sendiri sesuai dengan sistem Negara yang berlaku.<sup>2</sup>

Dalam peraturan Perundang-Undangan telah dijelaskan bahwa kelurahan diberikan kewenangan untuk dapat mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Peraturan tersebut telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di era yang sudah modern ini untuk mempermudah pekerjaan dari pemerintah pusat dalam mengelola dan mengawasi setiap wilayah di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Sri Wahyuni Nur, *“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tellumpanue Kabupaten Maros*, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis 2021 Universitas Muhammadiyah Jeber, 2021, h. 725.

<sup>2</sup> Riady Al Fajri, *“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan”*, Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2022, h. 2.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Kelurahan juga berhadapan langsung dengan masyarakat karena berada di wilayah dimana masyarakat itu tinggal. Kelurahan diberikan wewenang untuk mengelola dan mengatur anggarannya sendiri, yang merupakan bentuk implementasi dari otonomi daerah, guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Diawali dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan kini di revisi lagi menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang telah dijadikan landasan hukum untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah.<sup>4</sup>

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mempunyai upaya untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan daerah secara tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam mengelola keuangan daerah dibutuhkan standar akuntansi pemerintah yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diterima secara umum. Pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintah harus didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat diterima oleh

---

<sup>3</sup> Octafiani Clara Sanger, “*Analisis Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Kelurahan Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Kelurahan Titiwungen Selatan*”, Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya, vol 7 No. 4, 2023, h. 269-276.

<sup>4</sup> Bagus Surya Nur Aditya, “*Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan*” Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2023, h. 2

masyarakat mengenai keterbukaan pelaporan.<sup>5</sup> Pemerintah mulai menyalurkan dana kelurahan pada awal tahun 2019, dana kelurahan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang masuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat kelurahan itu sendiri. Dana kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat.<sup>6</sup> Alokasi dana kelurahan menurut UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 5% dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota ini diberikan untuk kelurahan yang diperuntukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat, berdasarkan permintaan dalam musyawarah saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (MUSRENBANGKEL) dengan warga yang kebanyakan menginginkan pembangunan fisik agar lebih ditingkatkan.

Pada pengelolaan keuangan daerah tingkat kelurahan, pengelolaan dana kelurahan penting agar dapat mengurangi tudingan unsur politis dari dana kelurahan yang telah dianggarkan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alokasi dana kelurahan diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tidak menjadi alat politik dan kepentingan pribadi. Alokasi dana kelurahan harus akuntabel dan transparan untuk laporan pertanggung jawaban keuangan kelurahan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Fauziyah, Miftahul Reza, “*Pengaruh Penyajian dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*”, 2021, h. 14.

<sup>6</sup> Octafiani Clara Sanger, “*Analisis Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Kelurahan Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Kelurahan Titiwungen Selatan*”, *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, vol 7 No. 4, 2023, h. 269-276.

<sup>7</sup> Riady Al Fajri, “*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan*”, Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2022, h. 6.

Selain akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi masyarakat menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran. Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBD dan masyarakat juga ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah di lapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.<sup>8</sup>

Permasalahan yang ditemukan peneliti pada saat observasi awal yaitu prinsip pengelolaan dana kelurahan tersebut seringkali diabaikan, dimana keberadaan prinsip tidak berjalan bersamaan dengan penerapannya. Pegawai kelurahan kadang hanya menjalankan prinsip akuntabilitas sebagaimana bentuk tanggung jawabnya sebagai pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada pihak yang memberi kewenangan.

Sedangkan permasalahan dalam aspek transparansi adalah pegawai Kelurahan Data belum sepenuhnya terbuka mengenai pengelolaan dana kelurahan, yaitu tidak ada informasi di papan pengumuman dan platform media sosial Kelurahan Data mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan alokasi dana kelurahan. Masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi anggaran keuangan kelurahan karena prosedur yang rumit. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap

---

<sup>8</sup> Rahma yulita, Nurlailah, “*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipas Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur*”, Jurnal Kolaboratif Sains volume 6 ISSUE, 2023, h.22.

pemerintah kelurahan. Sedangkan prinsip transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Masalah lainya seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat, dimana masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan dana kelurahan. Hal ini disebabkan karena masyarakat dianggap belum paham tentang prosedur pengelolaan dana Kelurahan Data.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten pinrang?
4. Apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten pinrang.

4. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Kelurahan Data, kabupaten Pinrang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan keilmuan terutama dalam topik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kelurahan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan guna membantu pihak Pemerintah Kelurahan dalam melihat pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan.
- b. Bagi Peneliti Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang lain tentang akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma Yulita pada tahun 2023, dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan di Kecamatan Palu Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara simultan maupun secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan di Kecamatan Palu Timur.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian Rahma Yulita dengan peneliti penulis adalah penelitian Rahma Yunita menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ciri-ciri variabel yang sedang di teliti sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan metode data primer dalam bentuk penilaian responden. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap svpengelolaan dana kelurahan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Haliza Nasution pada tahun 2024, dengan judul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kelurahan (Studi Kasus Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas

---

<sup>9</sup> Rahma Yulita, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur “, jurnal; universitas Abdul Asiz Lamadjido Palu, vol 6 ISSUE, 2023.



pemanfaatan dana kelurahan pada Kantor Lurah Karang Berombak tersebar secara luas dan mudah di akses oleh masyarakat, terutama informasi disajikan dalam format yang sederhana untuk dipahami dan tercantum secara detail. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kantor Lurah Karang Berombak sudah transparan dan akuntabel terhadap dana kelurahan.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu berfokus pada transparansi dan akuntabilitas sedangkan penelitian sekarang bukan hanya berfokus terhadap akuntabilitas dan transparansi tetapi juga berfokus terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti terdahulu adalah wawancara sedangkan peneliti sekarang menggunakan kuisioner. Adapun persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Surya Nur Aditya pada tahun 2023, dengan judul “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkar Kota Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkar Kota Semarang dengan mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Kelurahan. Hasil penelitian ini adalah Kelurahan Karangrejo sudah melaksanakan pengelolaan dengan baik namun belum maksimal, baiknya karena Kelurahan Karangrejo sudah membuat laporan secara berkala lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung untuk laporan kepada pemerintah kota, hasil kurang maksimalnya karena laporan tersebut hanya dibuat untuk pemerintah kota saja

---

<sup>10</sup> Rina Haliza Nasution, “*Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas terhadap Dana Kelurahan*”, Studi Kasus Kantor Lurah Karang Berombak. Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, vol 2 N0.4, 2024.

sedangkan masyarakat belum memiliki akses yang mudah dalam hal pengelolaan keuangan Kelurahan. Masyarakat juga mengeluhkan belum adanya papan informasi yang dapat dilihat secara langsung yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu lebih fokus terhadap satu variabel yaitu akuntabilitas sedangkan peneliti sekarang fokus terhadap tiga variabel yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dan juga terletak pada tempat penelitian. Adapun persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama membahas tentang akuntabilitas dimana pertanggung jawaban pemerintah daerah belum terlalu maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfan Syaputra pada tahun 2023, dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perespektif Ekonomi Islam di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa ditinjau dalam perpektif ekonomi islam di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan mengedarkan pernyataan dalam bentuk kuesioner. Metode analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana desa.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bagus Surya Nur Aditya, “*Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkar Kota Semarang)*”, Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2023.

<sup>12</sup> Zulfan Syaputra, “*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lieue*”

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah peneliti terdahulu menggunakan perspektif ekonomi islam sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan perspektif ekonomi islam dan peneliti terdahulu membahas tentang pengelolaan desa sedangkan peneliti sekarang membahas tentang pengelolaan dana kelurahan. Adpaun persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari pada tahun 2022, yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambek Kabupaten Deli Serdang”. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambek Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penyebaran angket atau kuesiner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif signifikan secara parsial dan simultan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambek Kabupaten Deli Serdang.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti sekarang adalah peneliti sebelumnya lebih memfokuskan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa sedangkan peneliti sekarang lebih memfokuskan terhadap pengaruh pengelolaan dana kelurahan dan penelitian sebelumnya memiliki sampel usia minimal SMA/SMK sedangkan peneliti sekarang tidak memandang pendidikan tetapi umur di atas 18 tahun. Adapun persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti sekarang

---

*Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi Sarjana: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah, 2023.

<sup>13</sup> Novita Sari, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambek Kabupaten Deli Serdang”, Skripsi Sarjana: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, 2022

adalah sama-sama membahas tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Akuntabilitas**

#### **a. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas menurut Mardiasmo merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* dalam satu pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi dan akuntabilitas adalah salah satu pilar tata kelola tersebut. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal).<sup>14</sup>

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. Akuntabilitas pemerintahan dianggap sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar berjalan dengan baik.<sup>15</sup>

Akuntabilitas sebagai kewajiban atau kewenangan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang bersangkutan, yang terdiri atas kewajiban untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya, serta kemungkinan untuk dikenai sanksi atas pelaksanaan kewenangan yang tidak memuaskan. Akuntabilitas yang dijelaskan menggambarkan sebuah proses yang melibatkan berbagai tindakan dan

<sup>14</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018 h.27

<sup>15</sup> Sri Wahyuni Nur dan Fitri, *Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tellumpanue Kabupaten Maros*”, *Jurnal Dedikai Masyarakat*, 3(1), 2019, h. 1-9.

responsibilitas yang terkait dengan pengelolaan kegiatan, keputusan dan sumber daya.<sup>16</sup>

Secara umum akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan pertanggungjawaban sebagai upaya untuk memnuhi tanggungjawab yang telah diserahkan kepadanya. Jika mengacu pada pasal 7 UU No. 28 tahun 1999 yang mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap penyelenggaraan atau kegiatan Negara harus memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menerangkan dan menjawab atau memberikan pertanggungjawaban atas kinerja atau tindakan baik berupa pribadi, badan hukum ataupun pimpinan organisasi terhadap pihak yang memiliki wewenang dan hak untuk menerima keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat pula diinterpretasikan sebagai keseluruhan aspek atas tindakan seseorang yang mencakup perilaku pribadi yang disebut akuntabilitas spiritual maupun tindakan yang bersifat eksternal terhadap orang sekeliling dan lingkungannya.

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas bahwa akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan kepada pemberi amanah. Digunakan sebagai bukti bahwa suatu amanah telah dikerjakan dengan baik. Akuntabilitas salah satu aktualisasi nilai dari prinsip-prinsip *good governance* yaitu kewajiban seseorang/pemimpin menjelaskan kinerja sebagai tindakan dalam mempertanggungjawabkan suatu organisasi yang menjadi hak wewenang dan menjawab pertanggungjawabannya. Sebagai keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diawasi

---

<sup>16</sup> Waluyo, “*Manajemen Publik Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*”, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, h. 203.

langsung oleh DPR dan Masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memberikan kontribusi untuk memberikan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan desa sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/4:58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>17</sup>*

Ayat diatas menjelaskan manusia sebagai pemimpin memiliki dua kewajiban, pertama memberi amanah kepada yang mendapatkan kepercayaan dan pada orang yang memegang urusan untuk mengatur hak manusia. Kedua, memberi keputusan secara adil kepada manusia dan menyampaikan kebenaran kepada orang yang dituju, serta mengatasi orang yang mengambil hak orang lain dan diberikan kepada yang lebih berhak. Ayat ini dapat diinterpretasikan dalam konteks akuntabilitas yaitu Allah SWT memerintahkan agar kita menjalankan amanat yang diberikan untuk setiap pihak terkait yaitu bagi pengguna informasi (stakeholder) dan hal ini kaitannya memenuhi hak untuk mendapatkan informasi dari laporan pertanggungjawaban.

#### b. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Ada beberapa jenis akuntabilitas tergantung konsep akuntabilitas yang mana kita gunakan, menurut Mardiasmo jenis-jenis akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

##### 1. Akuntabilitas Vertikal

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajah Pentashihan AlQur'an, 2019), An-Nisa 4/58

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

## 2. Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Jadi tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelola alokasi dana kelurahan kepada masyarakat dimana kepala lurah sebagai tanggungjawab utama.<sup>18</sup>

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa akuntabilitas dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Akuntabilitas keuangan, atau tanggungjawab terkait masalah keuangan, inspeksi dan seberapa jauh suatu pihak bisa menaati.
- b) Akuntabilitas manfaat, atau akuntabilitas ditinjau dari hasil kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah.
- c) Akuntabilitas prosedural, adalah tanggungjawab terkait apakah suatu kebijakan yang diselenggarakan sudah mempertimbangkan aspek moral, hukum, etika, aspek politis tertentu.<sup>19</sup>

## c. Kategori Akuntabilitas

### 1. Akuntabilitas Internal

Tipe akuntabilitas ini berlaku bagi pemerintah yang berada pada tingkat organisasi internal yaitu pejabat, pengurus publik baik secara kelompok hirarki maupun individu memiliki kewajiban dalam hal pertanggungjawaban terhadap atasannya terkait pengembangan kinerja kegiatan yang dilakukan secara periodik

<sup>18</sup> Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Binus University, 2016, h. 78-79.

<sup>19</sup> Wahyudi. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah* (Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKB, 2011), h. 11.



maupun pada saat diperlukan. Kewajiban terkait akuntabilitas internal pemerintah telah diamankan melalui instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 mengenai akuntabilitas instansi pemerintah.

## 2. Akuntabilitas Eksternal

Tipe akuntabilitas ini berlaku bagi setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi yang diberikan amanat dan pelaksanaannya harus dikomunikasikan kepada *stakeholder*.<sup>20</sup>

### d. Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo yang mengutip dari Elwood indikator untuk mengukur akuntabilitas penggunaan Dana dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diwajibkan dalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran adalah menghindari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin penegakan hukum, sementara akuntabilitas kejujuran menjamin praktek organisasi yang sehat.<sup>21</sup> Berikut ini adalah indikasi pertanggungjawaban hukum:

- a) Akuntabilitas Kinerja Proses Pelayanan Publik semuanya dapat digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja sektor publik seperti tingkat akurasi, profesionalisme petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan Perundang-Undangan), dan kedisiplinan.
- b) Ketentuan yang telah ditetapkan akuntabilitas biaya pelayanan publik hanya dipungut sesuai dengan peraturan.

<sup>20</sup> Rosjidi. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Surabaya: Aksara Satu, 2001, h,145.

<sup>21</sup> ABD Hamid, Musmulyadi dan Damirah. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keuangan Masyarakat di Desa Tangru Kabupaten Enrekang”, *Jurnal The Seybold Report*, ISSN 1533-9211, 2023, h. 650.



- c) Menentukan standar teknis dan administratif yang harus transparan. Akuntabilitas Produk Layanan Publik Kualitas dan validitas produk layanan harus menjadi pertimbangan.

## 2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses (process accountability). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah pemerintah sudah menjalankan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dalam hal pemutusan kebijakan.

## 3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berfokus pada penentuan apakah perusahaan telah memikirkan program-program alternative yang memberikan hasil terbaik dengan biaya serendah mungkin, serta apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Lembaga-lembaga publik bertanggungjawab atas inisiatif yang mereka rancang dan laksanakan hingga selesai. Dengan kata lain, akuntabilitas program mengimplikasikan bahwa inisiatif organisasi haruslah merupakan inisiatif berkaliber tinggi yang dapat membantu mencapai tujuan, visi dan sasaran organisasi serta strateginya. Berikut ini adalah indicator akuntabilitas program;

- a) Hasil dari pelaksanaan program
- b) Adanya kesesuaian antara tujuan dan pencapaian program
- c) Tujuan dan sasaran program dinyatakan dalam istilah yang jelas.

## 4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas pertanggungjawaban lembaga pemerintah atas kebijakan yang mereka ambil terkait dengan akuntabilitas kebijakan. Kebijakan yang telah diputuskan setelah mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga-lembaga publik. Ketika menyusun kebijakan, kita harus mempertimbangkan tujuan kebijakan, alasan di baliknya, audiens yang dituju, serta potensi kelemahannya. Berikut ini adalah indikator akuntabilitas kebijakan:

- a) Akuntabilitas keatas, mengindikasikan adanya kewajiban untuk melapor kepada pemimpin eksekutif dari pimpinan puncak disuatu tertentu.
- b) Akuntabilitas keluar, merupakan tanggungjawab pemimpin untuk menginformasikan, memberi nasehat, dan bereaksi terhadap klien dan pemangku kepentingan masyarakat.
- c) Akuntabilitas ke bawah, menjelaskan bahwa semua pemimpin tanpa memandang pangkatnya memiliki kewajiban untuk selalu menginformasikan dan memperkenalkan kebijakan kepada bawahanya, karena implementasi suatu kebijakan merupakan prasyarat untuk keberhasilan.

Untuk memuaskan publik, prinsip akuntabilitas harus diterapkan. Oleh karena itu bendahara harus memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan dana kelurahan kepada golongan sasaran dalam hal ini masyarakat.<sup>22</sup>

## 2. Transparansi

### a. pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*opensess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan hak kepada masyarakat untuk memiliki akses yaitu mengetahui proses anggaran dan segala informasi keuangan yang akan digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Nofrizal Rifandi. 2024. *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa* (Bandung: Widina Media Utama), h. 12-13.

<sup>23</sup> Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi Offset), h.302

Menurut standar akuntansi pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan dana kelurahan. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya.

Menurut beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Adanya transparansi memberi manfaat positif bagi kepentingan publik yaitu mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat dapat mengukur kinerja pemerintah.

Transparansi sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik, sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Proses penyampaian informasi tersebut bukanlah hasil dari transparansi, transparansi dapat diraih jika pihak bank mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan sesuai dengan definisi sebagaimana yang telah disebutkan. Untuk

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun, Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Bandung: Fokus Media. 2009, h. 23.

mencapai transparansi, organisasi harus memberikan informasi terkait kegiatan dan tata Kelola kepada para pemangku kepentingan yang akurat, lengkap dan tersedia secara tepat waktu. Ini tidak berarti semua informasi harus tersedia untuk umum.<sup>25</sup>

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam menjalankan amanah rakyat sangat penting untuk melaksanakan transparansi. Mengingat bahwa pengambilan berbagai keputusan penting yang berdampak pada rakyat merupakan kewenangan pemerintah saat ini. Transparansi merupakan instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari korupsi. Transparansi dalam pengelolaan publik merupakan prinsip tata kelola yang baik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukan transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

- a) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran).
- b) Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
- c) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang terkait.
- d) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak yang terkait.<sup>26</sup>

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah pada saat menjalankan amanah rakyat, transparansi menjadi satu hal yang sangat penting. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil beberapa keputusan penting

---

<sup>25</sup>Andi Ayu Frihatni, Nirwana dan Syamsuddin. “Penerapan Standar Akuntansi dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 4, Nomor 3, 2021, h.233.

<sup>26</sup> Mahmudi. *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 17-18.

yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi merupakan metrik yang penting karena menunjukkan profesionalisme penyelenggara, semakin transparan semakin baik. Gagasan transparansi menggaris bawahi perlunya semua tindakan terlihat dan tidak disembunyikan. Transparansi umumnya dianggap sebagai kejujuran dan keterbukaan. Hal ini sering dikaitkan dengan pengungkapan pengetahuan dasar dan terbatas secara pasif agar orang lain dapat mengetahui kebenaran. Menurut Firman Allah, pemerintah harus transparan dalam penggunaan dana kelurahan, Q.S. Al-Maidah/6:67.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ

Terjemahnya:

*Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berrati) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya.*

Ayat ini menyiratkan bahwa selain berpegang teguh pada hukum yang berlaku, pemerintah yang bertugas mengelola dana kelurahan juga harus memegang teguh perintah Allah SWT, yaitu selalu berkomunikasi secara jujur dan transparan, menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, memegang teguh amanah dan bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap usaha yang dilakukan memperoleh pahala.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajah Pentashihan AlQur'an, 2019), Al-Maidah/6:67.

#### b. Indikator Transparansi

Indikator transparansi menurut Kristianten dapat diukur dengan hal berikut, yaitu:

1. Keterbukaan akses informasi yang jelas.
2. perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat.
3. Keterbukaan informasi tentang anggaran dan realisasi.
4. Keterbukaan proses pengelolaan dana.<sup>28</sup>

### 3. Partisipasi

#### a. Pengertian Partisipasi

Siti Irene dalam bukunya yang berjudul *Desentralisasi dengan mengutip pendapat dari Cohen dan Uphoff mengenai pengertian partisipasi*, mendefinisikan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program. Jadi partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu hal atau program yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Keterlibatan tersebut berupa kontribusi dalam kegiatan yang telah diputuskan serta bersama-sama memanfaatkan hasil program tersebut.<sup>29</sup>

Bank Dunia memberi batasan partisipasi masyarakat sebagai pertama, keterlibatan masyarakat yang terkena dampak pengambilan keputusan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Kedua, keterlibatan tersebut berupa kontribusi dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan. Ketiga, bersama-sama memanfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari program tersebut.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 73.

<sup>29</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pedidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 51.

<sup>30</sup> Hendra Karianga. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Keuangan Daerah*, Bandung: PT. Alumni, 2011, h. 213.

Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan. Dalam hal ini, partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memungkinkan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mereka mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih. Disini Chambers menggambarkan bahwa “kita” (agen perubahan) berpartisipasi dalam proyek “mereka” (masyarakat lokal) sehingga terjadi apa yang disebut dengan proses pemberdayaan masyarakat.<sup>31</sup>

Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembangunan, kewenangan, tanggung jawab dan manfaat, sehubungan dengan hal itu, berbagai kegiatan partisipasi akan mencakup:

1. Menjadi anggota kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri dalam kegiatan diskusi kelompok

---

<sup>31</sup> Rukminto Adi, Isbandi. *“Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat”*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.198.



3. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain.
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan masyarakat.<sup>32</sup>

Partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat meyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana kelurahan, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti, ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

b. Jenis-Jenis Partisipasi

Kita menyadari bahwa partisipasi masyarakat yang aktif akan kembali berdampak pada kepentingan mereka sendiri, karena dalam pengembangan suatu kelurahan dibutuhkan kerjasama dengan setiap lapisan masyarakat didalamnya agar dapat mengembangkan potensi serta peluang yang ada. Terdapat dua klasifikasi partisipasi dilihat dari keterlibatannya menurut Sundariningrum dalam Ambar Teguh S yaitu:

---

<sup>32</sup> Isbandi Rukminto Adi, “*Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*”, Jakarta: FISIP UI Press, 2007, h. 21.



### 1. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

### 2. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.<sup>33</sup>

### c. Indikator Partisipasi

Berikut indikator partisipasi adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

#### 2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

#### 3. Partisipasi Dalam Pengawasan pengelolaan dana

Pengawasan pengelolaan dana adalah proses memastikan dana dikelola secara transparan, akuntabel, tertib, efisien dan efektif sesuai dengan peraturan

---

<sup>33</sup> Hamijoyo.” *Partisipasi Dalam Pembangunan*”, Jakarta: Depdikbud, 2007, h. 39.

Perundang-Undangan yang berlaku. Pengawasan ini melibatkan berbagai pihak salah satunya adalah masyarakat. Pengawasan pengelolaan dana menjadi faktor kunci dalam mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Dengan demikian pengelolaan dana desa yang diawasi secara optimal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>34</sup>

#### 4. Konsep Akuntansi Syariah

##### a. Pengertian Akuntansi Syariah

Dalam dunia bisnis, akuntansi syariah sangat penting untuk pengelolaan sekaligus sebagai penghasil informasi keuangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Akuntansi syariah dipandang dari sisi lughah (bahasa Arab) adalah al-muhasabah yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.<sup>35</sup> Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan Keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.<sup>36</sup> Secara umum, akuntansi syariah merupakan suatu seni yang digunakan untuk mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, melaporkan, dan menganalisa menggunakan prinsip syariah dalam pelaksanaannya guna mendapatkan kemaslahatan untuk semua aspek yang ada.<sup>37</sup>

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai islam dengan

<sup>34</sup> Effendi. *Bentuk Partisipasi*. (dalam sari, 2016), h.60.

<sup>35</sup> Muammar Khaddafi dkk. 2016. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, (Medan: Madenatera), h. 13.

<sup>36</sup> Indrayani, “*Modul Akuntansi Dasar*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023, h.3.

<sup>37</sup> Ny Latifah dkk. 2022. *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara), h. 4.

prinsip-prinsip syariah.<sup>38</sup> Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yaitu akuntansi dan syaria. Definisi dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.<sup>39</sup> Tingginya rasa keberagaman masyarakat muslim untuk menjalankan syariah islam dalam kehidupan sosial ekonomi, maka semakin banyak pula institusi bisnis islam yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang diterapkan pada institusi islam inilah yang berkembang menjadi akuntansi syariah. Secara akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.<sup>40</sup>

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Nubuwwah adalah salah satu rancang bangun ekonomi Islam, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasulullah yang diutus demimenyempurnakan akhlaq manusia, dan sebagai rahmatan lil alamin. Konsep Nubuwwah memberikan pemahaman bahwa jika seseorang ingin mencapai keselamatan dunia akhirat, maka segala aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi. Mewujudkan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah SWT, dengan melaksanakan pertanggungjawaban atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi, serta proses produksi dalam organisasi adalah tujuan akuntansi syariah yang merupakan subsistem dari ekonomi Islam.<sup>41</sup>

Menurut Adnan tujuan akuntansi syariah adalah membantu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi (Al Falah) dan memahami secara

<sup>38</sup> Umi Purwanti. 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*. 3.2, h. 82.

<sup>39</sup> Sri Nurhayati. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat), h. 2.

<sup>40</sup> James M Reeve. 2009. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia* (Edisi Terjemahan; Jakarta: Salemba Empat), h. 9.

<sup>41</sup> Sri Kasnelly. 2021. "Teori Dan Praktek Akuntansi Syariah," *AL-AMAL: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol. 1, no. 1.

utuh kewajiban terhadap Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait dalam aktivitas ekonomi (akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai sebuah bentuk ibadah. Ekonomi kapitalis mengajarkan perspektif bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi yang dilakukan oleh akuntan, auditor ataupun pihak lainnya merupakan kesepakatan atau negosiasi yang mengandung nilai uang, oleh karena perspektif tersebut cukup sulit bagi masyarakat Islam untuk memahami setiap aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi dapat dijadikan sebagai sebuah bentuk ibadah.<sup>42</sup>

### c. Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki peran yang cukup penting khususnya dalam berkelanjutan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang dimana sebagian besar masyarakatnya mayoritas muslim. Pada hakikatnya, akuntansi syariah tidak akan pernah lepas dari berkembangnya agama islam di Indonesia. Umat islam berkewajiban mencatat setiap transaksi non tunai Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَنَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيعلمكم الله ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>42</sup> Muhammad Akhyar Adnan. 2005. *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek, Dan Tantangannya*, (Yogyakarta: UI Press).

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>43</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk senantiasa menjaga keadilan dan kebenaran, artinya dalam melakukan transaksi

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI., Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), Al-Baqarah/2: 282.

keuangan perlu menekankan pentingnya pencatatan yang benar, pengawasan yang ketat, keadilan dalam alokasi dana dan transparansi kepada masyarakat serta membangun kepercayaan yang kuat di antara masyarakat terhadap pemerintahnya. Al-Quran melindungi kepentingan masyarakat dengan menjunjung sebuah keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi syariah bukanlah pengambilan keputusan melainkan lebih ke pertanggungjawaban. Seorang akuntan yang profesional diharapkan memiliki integritas dan cermat dalam melaksanakan tugas pembukuan.

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya, yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Berikut ini prinsip-prinsip akuntansi syariah dan penjelasannya:

1. Prinsip pertanggungjawaban

Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an. Maksudnya setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seorang pembisnis harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki 2 pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi modern menjadi akuntansi alternatif yang lebih baik.

3. Prinsip kebenaran

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan dengan baik bila memiliki rasa kebenaran.<sup>44</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwa dalam menyusun laporan keuangan harus didasarkan pada sifat yang baik, jujur, dapat dipercaya dan juga adil sehingga seorang akuntan wajib untuk melaporkan semua transaksi yang terjadi sesuai fakta, teliti dan sesuai dengan syariat islam.

#### 4. Pengeolaan Dana Kelurahan

Undang-Undang pedoman Dana Alokasi Umum yang diperuntukan bagi kelurahan di Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pasal 11 ayat 17. Pedoman tersebut berpusat pada pembangunan infrastruktur kelurahan dan dukungan kegiatan yang diselenggarakan oleh kelurahan. Pemerintah daerah menyalurkan dana untuk tujuan pemberdayaan masyarakat kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMDA pasal 230 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kelurahan pasal 30 ayat 1.<sup>45</sup>

Menurut Saren, pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, total yang dialokasikan untuk anggaran Kelurahan diberikan kepada kelurahan yang berasal dari sisa dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf C peraturan pemerintah tersebut, Kabupaten atau Kota yang mendapatkan dana

<sup>44</sup> Muhammad, “*Pengantar Akuntansi Syariah*”, Jakarta: Salemba Empat, 2002, h. 11

<sup>45</sup> Rina Hailza Nasution & Nurbaiti. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kelurahan* (Studi Kasus Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume.2 No.4, p-ISSN: 3025-4663*, 2024, h. 65-78.



kelurahan harus menyisihkan paling sedikit 55 dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut kemudian dibagikan secara proporsional kepada setiap kelurahan untuk pengelolaan dana kelurahan. Oleh karena itu, kelurahan memiliki hak untuk menerima Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).<sup>46</sup>

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu. DAK bertujuan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Secara umum Alokasi Dana Kelurahan ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan Kelurahan (APBDes), untuk memberi keleluasaan dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan kelurahan, untuk mendorong terciptanya demokrasi kelurahan serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).<sup>47</sup>

Pengelolaan dana kelurahan merupakan kegiatan/aktivitas yang meliputi aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kelurahan. Pengelolaan dana kelurahan ini tentunya

---

<sup>46</sup> Saren, Christine Monica, Tinangon, Jantje J. *Studi Program Akuntansi, Magister Ekonomi Fakultas Bisnis. Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL", 13(1), 101-112. 2022.*

<sup>47</sup> Riady Al Fajri. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan (Studi Kasus Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupateten Gowa)", Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar, 2022, h. 22



harus dilakukan secara baik, profesional dan tepat sasaran sesuai peraturan yang ada serta prinsip mendasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Yang dimaksud dengan *good governance* adalah akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, demokrasi, partisipasi. Dalam kegiatan pengelolaan dana ini, sangat dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik agar supaya benar-benar memenuhi kepentingan rakyat dan terhindar dari upaya-upaya penyelewengan atau korupsi yang bisa merugikan masyarakat kelurahan itu sendiri.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah kelurahan menyusun perencanaan pengembangan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya.

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Kelurahan dimulai dari lurah selaku penanggungjawab mengadakan musyawarah untuk membahas rencana penggunaan dana kelurahan yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Kelurahan, Badan Permusyawaratan, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APB.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau bisa disebut dengan penggerakan adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan anggaran kelurahan yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi dan pengeluaran kelurahan.

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan kelurahan dilakukan melalui rekening kas keluarahan. Jika kelurahan yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran kelurahan harus didukung oleh bukti lengkap yang sah.

Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APB yang pembiayaanya bersumber dari dana kelurahan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri. Penatausahaan meliputi penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh bendahara. Lurah dalam melaksanakan penatausahaan keuangan kelurahan harus menetapkan Bendahara Kelurahan, penetapan Bendahara Kelurahan harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Lurah.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan pada tahap ini pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB paling lambat per 31 Desember tahun yang berkenaan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Pelaporan

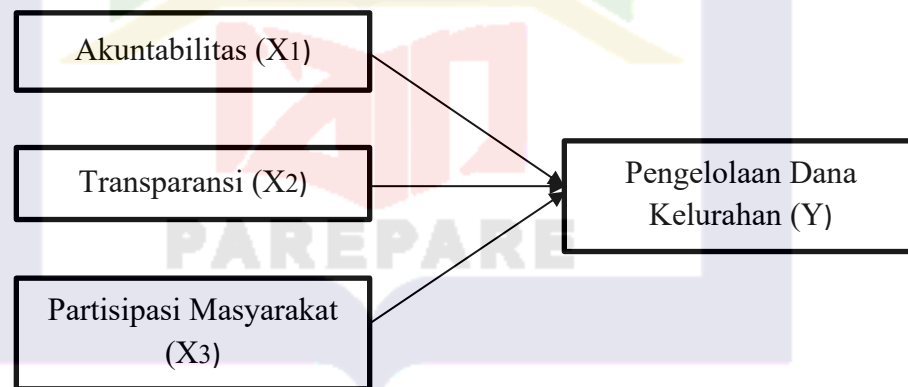
dilakukan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan kelurahan seperti perkembangan kegiatan, penyerapan dana yang digunakan, permasalahan yang terjadi dan cara pemecahannya beserta hasil pencapaiannya.

e. Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Kelurahan, lurah memiliki peran sebagai penanggungjawab dalam Tim Pengelola Kegiatan. Pertanggungjawaban tersebut mencakup semua tahapan pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dicatat dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan.<sup>48</sup>

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan representasi pola hubungan antara konsep dan variabel yang menyajikan gambaran lengkap tentang fokus penelitian. Biasanya disajikan dalam bentuk skema atau diagram.<sup>49</sup> kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

<sup>48</sup> Bagus Surya Nur Aditya. “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkar Kota Semarang)”, Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2023, h. 26

<sup>49</sup> Sugiyono. “Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D”, Bandung Alfabeta, 2019, h. 72.

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Solusi yang diberikan berdasarkan pada ide-ide yang relevan dan belum relevan berdasarkan pengumpulan data, sehingga dikatakan bersifat sementara.<sup>50</sup> penelitian ini memiliki 4 hipotesis yaitu:

##### 1. Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah kelurahan dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat.<sup>51</sup>

Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan telah dilakukan penelitian oleh Rahma Yulita,<sup>52</sup> menunjukkan pengelolaan dana kelurahan telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan besaran nilai koefisien akuntabilitas yaitu 0,415. Hal ini berarti setiap peningkatan akuntabilitas akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan dana kelurahan sebesar 0,415. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana kelurahan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>1</sub>: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Kelurahan.

<sup>50</sup> Muhammad Darwin. “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Bandung; CV. Media Sains Indonesia, 2021, h. 83

<sup>51</sup> Yusri, SH, M.Si. “*Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* (Bandung: PT Inovasi Pratama Internasional”, 2023, h. 29

<sup>52</sup> Rahma Yulita. “*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan Di Kecamatan Palu Timur*”, Jurnal; Universitas Abdul Asiz Lamadjido Palu, vol 6 ISSUE, 2023.

## 2. Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kelurahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan hak kepada masyarakat untuk memiliki akses yaitu mengetahui proses anggaran dan segala informasi tentang pengelolaan dana.<sup>53</sup>

Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat berhak tahu tentang proses anggaran yang menyangkut kepentingan dana aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa.

Kumalasari menyatakan bahwa transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan.<sup>54</sup>

Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana kelurahan telah dilakukan penelitian oleh Zulfan Syaputra,<sup>55</sup> menunjukkan transparansi berpengaruh signifikan pengelolaan dana kelurahan. Hal ini berarti jika setiap terjadi peningkatan transparansi sebesar 1 satuan maka efektivitas pengelolaan dana desa juga akan meningkat sebesar 0,344.

H<sub>2</sub>: Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Kelurahan.

---

<sup>53</sup> Mardiasmo. *Otonomi dan Management Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, h.25

<sup>54</sup> Kumalasri, D., & Riharjo, I. B. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasidana Desa*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1-15, 2016, h.28.

<sup>55</sup> Zulfan Syaputra. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Skripsi Sarjana: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah, 2023. h.34.

### 3. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan

Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penentuan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk mengatasi masalah, dan kontribusi masyarakat dalam proses menilai perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan.<sup>56</sup>

Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan dana desa. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana telah dilakukan penelitian oleh Novita Sari,<sup>57</sup> menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana keuangan.

Hal tersebut dibuktikan dengan besaran nilai koefisien partisipasi masyarakat yaitu 0,157. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan partisipasi masyarakat akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan dana.

H<sub>3</sub>: Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Kelurahan.

---

<sup>56</sup> Zulfan Syaputra. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lieve Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Skripsi Sarjana: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah, 2023, h. 61.

<sup>57</sup> Novita Sari. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang”, Skripsi Sarjana: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, 2022, h. 37

#### 4. Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan

Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan telah dilakukan penelitian oleh Riady Al Fajri, <sup>58</sup>menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana kelurahan. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan faktor pendukung baik tidaknya pengelolaan dana kelurahan, transparansi merupakan faktor pendukung pengelolaan keuangan yang baik pada tingkat kelurahan. Transparansi menjamin akses atau kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan dana kelurahan dan partisipasi dimana masyarakat harus diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelurahan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riady Al Fajri hasil uji simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 40.846 dan nilai F table sebesar 2,76 sehingga nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian variabel independen akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan partisipasi (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen efektivitas pengelolaan dana kelurahan.

H4: Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan Dana Kelurahan

---

<sup>58</sup> Riady Al Fajri. “*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan (Studi Kasus Kelurahan Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa)*”, Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Bosowa Makassar, 2022, h.28



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana data-data yang digunakan berupa angka dan dianalisis dengan teknik statistika.<sup>59</sup> Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan asosiatif, dimana tujuan pendekatan ini untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme. Hal ini untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan dimaksudkan penelitian yang sistematis mengumpulkan data dari lapangan.<sup>60</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana tempat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Pemilihan lokasi ini dikarenakan subjek dari penelitian merupakan Masyarakat Kelurahan Data.

##### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 1 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>59</sup> Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*”

<sup>60</sup> Sugiyono. “*Metode Penelitian Manajemen*”, Bandung: Alfabeta”, 2015, h.18.



### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Menurut Cramer & Howit dalam I Ketut Swarjaya, populasi adalah semua jenis individu tertentu, yang mana hal ini dibatasi oleh lokasi geografis atau karakteristik lainnya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Data.

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Data

Nama Lingkungan	Jumlah	
	L	P
Data	1.215 Orang	1.486 Orang
Ujung Baru	730 Orang	1.106 Orang
Salubone	425	663
<b>Total</b>	<b>2.370</b>	<b>3.255</b>

Sumber data: Kantor Kelurahan Data, 2025

Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5.625 masyarakat yang berdomisili Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang.

#### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti secara mendalam. Sampel diambil Ketika kita merasa tidak mampu meneliti seluruh populasi. Syarat utama sampel ialah harus memiliki populasi. Oleh karena itu, semua ciri-ciri populasi harus diwakili dalam sampel.

Adapun Teknik yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel adalah *purposive sample*. Menurut Sugiyono, *purposive sample* yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data sampel yang diambil tidak secara acak. Dengan kata lain sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang didasarkan

pada tujuan penelitian.<sup>61</sup> Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan rumus Slovin yang dikembangkan<sup>62</sup> yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{5.625}{1 + 5.625(0,1)^2}$$

$$n = \frac{5.625}{57,25}$$

$$n = 98,55$$

keterangan:

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

$e^2$  : batas toleransi kesalahan (error)

jadi sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 sampel.

#### **D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara dalam mengumpulkan data pada suatu penelitian. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dengan skala pengukuran instrumen penelitian menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana Kelurahan.

##### **1. Angket/Kuesioner**

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden.

<sup>61</sup> Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*”, Bandung; Alfabeta, 2013, h.

<sup>62</sup> Husein Umar. “*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*”, Jakarta: Rajawali, 2013, h.20

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pernyataan tertulis yang akan diberikan kepada pegawai kelurahan dan masyarakat kelurahan data sebagai populasi dalam penelitian ini. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria yang diinginkan.<sup>63</sup>

## 2. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer.<sup>64</sup> Adapun pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS 26 (*Statistic Package for the Social Sciense*).

## E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pernyataan praktis dan teknis tentang variabel dan sub variabel yang dapat diukur dan dapat dicarikan datanya.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu variabel bebas/independen (X) dan terikat/dependen (Y).

### 1. Variabel Independen (X)

Variabel independen (variabel bebas) yaitu variabel yang menjadi penyebab atau pengaruh terjadinya perubahan pada variabel dependen (terikat), baik itu berpengaruh secara positif maupun negative. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Akuntabilitas (X1)

<sup>63</sup> Nana Sudjana. 2018. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algesindo), h.24.

<sup>64</sup> Muhammad Kamal Zubair and dkk. “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (IAIN Parepare Nusantara Press)”, 2020, h. 28

<sup>65</sup> Syofian Siregar. “*Metode Penelitian Kuantitatif (dilengkapi perbandingan perhitungan manual & SPSS)*”, Jakarta; kencana, 2013, h, 19.

Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah kewajiban pihak kelurahan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas diukur dengan indikator sebagai berikut <sup>66</sup>:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
  2. Akuntabilitas program
  3. Akuntabilitas kebijakan
  4. Akuntabilitas pertanggungjawaban
- b. Transparansi (X2)

Transparansi dalam penelitian ini adalah keterbukaan atau penjelasan pihak kelurahan tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan beserta sumber daya yang digunakannya. Menurut Kristiante, transparansi dalam penelitian ini diukur dengan beberapa indikator yaitu:<sup>67</sup>

1. Keterbukaan akses informasi yang jelas
  2. perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat
  3. Keterbukaan informasi tentang anggaran dan realisasi
  4. Keterbukaan proses pengelolaan dana
- c. Partisipasi (X3)

Partisipasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan

---

<sup>66</sup> Mardiasmo. “*Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*“, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, h.302

<sup>67</sup> Kristianten,” *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 73

aspirasinya. Menurut Effendi partisipasi dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:<sup>68</sup>

1. perencanaan
  2. Pengambilan keputusan
  3. Pelaksanaan kegiatan
  4. Pengawasan pengelolaan dana
2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (variabel terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau yang menjadi akibat adanya variabel independen (variabel bebas). Variabel dependen yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pengelolaan dana kelurahan. Berikut indikator dana kelurahan yaitu:

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap penatausahaan
4. Tahap pelaporan
5. Tahap pertanggungjawaban

#### **F. Instrumen Penelitian**

Menurut Sugiyono instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Purwanto, instrument penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrument penelitian dibuat sesuai dengan tujuan pengukuran dan teori yang digunakan sebagai dasar.<sup>69</sup>

Instrument pengumpulan data merupakan sebuah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sehingga peneliti lebih mudah dalam mengelola data. Teknik instrument satu sama lain saling menguatkan agar benar-benar valid, salah satu hal utama yang mempengaruhi kualitas dan hasil

<sup>68</sup> fendi. *Bentuk Partisipasi*. (dalam sari 2016), h.60.

<sup>69</sup> Sukendra I & I Kadek. *Instrument Penelitian*. Pontianak; Mahameru Press, 2020, h. 1

penelitian yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument penelitian dengan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan skala likert, maka variabel akan diukur menjadi indikator variabel yang kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Adapun jawaban yang digunakan dalam skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negative dengan 5 (lima) item jawaban yang masing-masing memiliki nilai yang berbeda, yang terlampir sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (ST)
3. Kurang Setuju (KS)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

#### **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Adapun teknik analisis data yang dipakai yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 26. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Metode analisis deskriptif merupakan metode yang menjelaskan suatu data yang telah dikumpulkan dan diringkas pada aspek-aspek penting berkaitan dengan data tersebut. Biasanya meliputi gambaran atau mendeskriptifkan suatu data mean, median, modus, range, varian, frekuensi,

nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Data diperoleh dari data primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh sejumlah responden penelitian.<sup>70</sup>

## 2. Uji Validitas

Validitas yang dimaksud disini untuk mengukur validitas sejauh mana ketepatan/kecermatan data yang dikumpulkan dari instrument kuesioner yang dilakukan dalam penelitian pada pengolahan data yang bukan nominal.<sup>71</sup> Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Dasar pengambilan uji validitas person ada 2 yaitu:

### a. Perbandingan nilai r hitung dengan r tabel

- Jika  $r \text{ hitung} > r \text{ table} = \text{VALID}$
- Jika  $r \text{ hitung} < r \text{ table} = \text{TIDAK VALID}$

### b. Perbandingan nilai signifikan dengan 0,05

- Jika nilai signifikan  $< 0,05 = \text{VALID}$
- Jika nilai signifikan  $> 0,05 = \text{TIDAK VALID}$

## 3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu untuk menguji konsisten alat ukur, apakah hasilnya tetap konsisten jika pengukuran diulang. Instrument kuesioner yang tidak reliabel maka tidak dapat konsisten untuk pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak dapat dipercaya.<sup>72</sup> Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

<sup>70</sup> Hamta, F. “*Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Akuntansi*”. Edisi Pertama. Deepublish, 2015, h. 83.

<sup>71</sup> Hamta, F. “*Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Akuntansi*”. Edisi Pertama. Deepublish, 2015, h. 83-84.

<sup>72</sup> Hamta, F. “*Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Akuntansi*”. Edisi Pertama. Deepublish, 2015, h.87.

- Jika nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$  maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten.
- Jika nilai *Cronbach Alpha*  $< 0,60$  maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau konsisten.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan pengujian asumsi klasik ini di tujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria. Uji asumsi klasik terdiri uji normalitas heteroskedastisitas, multikolinearilitas.

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikan  $>$  dari 0,05 atau 5%.<sup>73</sup>

##### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat diartikan sebagai uji yang dirancang untuk melihat adakah ketidaksamaan dari suatu residual model regresi ke observasi lainnya dengan menggunakan kriteria pengujian yaitu: Apabila nilai *sig*  $> 0.05$  maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai *sig*  $< 0.05$  maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas.

<sup>73</sup> Syofian Siregar. “Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17”, Jakarta PT Bumi Aksara, 2015, h. 153



### c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dengan *variance inflation factor* (VIF), atau dengan melihat *eigenvalues* dan *condition index* (CI) untuk korelasi person antar variabel-variabel bebas. Fungsinya untuk mendapatkan informasi ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.<sup>74</sup> Adapun dasar pengambilan uji multikolineritas ada dua yaitu:

- Melihat nilai *tolerance*: jika nilai *tolerance* lebih besar dari  $> 0,1$  maka artinya tidak terjadi multikolinearitas.
- Melihat nilai VIF: jika nilai VIF lebih kecil dari  $< 10,00$  maka artinya tidak terjadi multikolinearitas.

### d. Uji One Sampel t Test

Uji one sampel t test ini dilakukan setelah uji normalitas terpenuhi. Uji one sampel t test digunakan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata sampel yaitu apakah rata-rata sampel sama dengan nilai rata-rata populasi yang diketahui atau tidak.<sup>75</sup> dasar pengambilan keputusan uji one sampel t test:

- a) Jika nilai sig (2-tailed)  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- b) Jika nilai sig (2-tailed)  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Tabel 3.2 Tabel Klasifikasi

Skor	Klasifikasi
84,01% - 100%	Sangat baik

<sup>74</sup> Hamta, F. “Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Akuntansi”, Edisi Pertama. Deepublish, 2015, h. 89-90.

<sup>75</sup> Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, Bnadung; Alfabeta, 2013, h. 180.

68,01% - 84,00%	Baik
52,01% - 68,00%	Sedang
36,01% - 52,00%	Buruk
20,00% - 36,00%	Sangat Buruk

Sumber: *Sugiyono (2017)*

- Menentukan skor ideal

Skor ideal = skor tertinggi  $\times$  jumlah responden  $\times$  jumlah item

- Menentukan nilai rata-rata

Nilai rata-rata  $\bar{x} = \Sigma x/n$

Keterangan:

$\bar{x}$  : nilai rata-rata

$\Sigma x$ : jumlah dari semua jawaban responden

$n$  : jumlah responden

## H. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui kebenaran dari asumsi yang telah dibuat sebelumnya secara statistik dan penarikan kesimpulan. Uji hipotesis terbagi atas beberapa bentuk pengujian yaitu:

### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda. Analisis Regresi Linear Berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variable faktor penyebab (X) terhadap variable akibatnya (Y). Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots e$$

Di mana:

Y = Pengelolaan Dana Kelurahan

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien
X1	= Akuntabilitas
X2	= Transparansi
X3	= Partisipasi
e	= Standar error

## 2. Uji Korelasi *Pearson Product Moment*

Korelasi produk moment adalah Teknik statistic yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel dan untuk menguji hipotesis.<sup>76</sup> Teknik korelasi ini dikembangkan oleh Karl Pearson yang karenanya sering dikenal dengan istilah Teknik korelasi pearson. Disebut dengan *Product Moment Corelation* karena koefisien korelasinya diperoleh dengan cara mencari hasil perkalian dari moment-moment variabel yang di korelasikan.

Dalam meningkatkan tingkat kekuatan hubungan antar variabel, dapat berpedoman pada nilai interpretasi koefisien korelasi berikut:

- Nilai koefisien korelasi 0,00 – 0,199 = hubungan sangat lemah
- Nilai koefisien korelasi 0,20 – 0,399 = hubungan lemah
- Nilai koefisien korelasi 0,40 – 0,599 = hubungan cukup kuat
- Nilai koefisien korelasi 0,60 – 0,799 = hubungan kuat
- Nilai koefisien korelasi 0,80 - 1,00 = hubungan sangat kuat

Dasar pengambilan Keputusan pada uji korelasi product moment:

- Jika nilai signifikan  $<0,05$  maka terdapat korelasi
- Jika nilai signifikan  $>0,05$  maka tidak terdapat korelasi

## 3. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi merupakan nilai yang digunakan untuk melihat sejauh mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Nilai ini merupakan ukuran ketepatan/kecocokan garis regresi yang diperoleh

<sup>76</sup> Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung; Alfabeta, 2013, h. 156.

dari pengaduan data yang diobservasi atau diteliti. Nilai ( $R^2$ ) dapat diinterpretasikan sebagai presentasi nilai yang menjelaskan keragaman nilai Y, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti<sup>77</sup> untuk mengetahui besar atau kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dipergunakan koefisien determinasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = (R^2) \times 100\%$$

#### 4. Uji t Parsial

Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat digunakan tingkat signifikan 5%. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikan < 0.05, maka secara parsial terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai t hitung < t tabel dan nilai signifikan > 0.05, maka secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 5. Uji Simultan F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y), dengan kriteria semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi dari variabel pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai F hitung > F tabel dan nilai signifikan < 0.05, maka secara simultan terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

---

<sup>77</sup> Firdaus, Buku bahan ajar metode akuntansi, edisi pertama

- Jika nilai  $F$  hitung  $< F_{\text{tabel}}$  dan nilai signifikan  $> 0.05$ , maka secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan variabel indepen terhadap variabel dependen.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> Syafian Lailan and Nurlaila Harahap. “Metode Penelitian Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif” (Medan: FEBI UIN-SU Press), 2019, h. 74-78

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Responden

##### 1. Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1.0	1.0	1.0
25-34	24	24.2	24.2	25.3
35-44	43	43.4	43.4	68.7
45-54	31	31.3	31.3	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Sumber data: *Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025*

Tabel 4.1 diatas menunjukkan responden berdasarkan kualifikasi usia adalah usia 25-34 tahun sebanyak 24 responden atau sebesar 24,2% dan usia 35-44 tahun sebanyak 44 responden atau sebesar 44,47 sedangkan usia 45-54 tahun sebanyak 31 responden atau sebesar 31,3%. Berdasarkan data yang telah diolah diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak merupakan responden dengan rentan usia 45-54 tahun sedangkan responden yang paling sedikit merupakan responden dengan rentan usia 25-34.

##### 2. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1.0	1.0	1.0
laki-laki	62	62.6	62.6	63.6
perempuan	36	36.4	36.4	100.0

Total	99	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

Sumber Data: *Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025*

Tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya responden dari hasil data penelitian mayoritas responden di dominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 62 responden atau sebesar 62,6% dan sisahnya adalah Perempuan dengan jumlah 36 responden atau sebesar 36,4%.

### 3. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1.0	1.0	1.0
S1	15	15.2	15.2	16.2
SMA/SMK	27	27.3	27.3	43.4
SMP	56	56.6	56.6	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Sumber Data: *Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden berdasarkan pendidikanya yaitu S1 sebanyak 15 orang, SMA/SMK sebanyak 27 orang dan sisahnya SMP sebanyak 56 orang.

## B. Distribusi Jawaban Responden

### a. Distribusi Jawaban Responden Untuk Variabel Akuntabilitas

Tabel 4.4 Distribusi Jawaban Kuesioner Akuntabilitas

No	Akuntabilitas	SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Pemerintah kelurahan harus memiliki prosedur hukum pedoman dana kelurahan sebagai landasan dalam pembuatan Keputusan	44	53	2	0	0

2	Proses penetapan program-program dana kelurahan dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran.	36	51	12	0	0
3	Kepentingan public dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam penggunaan dana kelurahan.	31	60	8	0	0
4	Pemerintah kelurahan telah mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan public secara proporsional kepada pihak melalui laporan pertanggungjawaban.	30	51	17	1	0
5	Pertanggungjawaban tim pengelolaan dana kelurahan kepada Masyarakat melalui laporan realisasi dana kelurahan.	27	51	20	1	0
<b>Total</b>		168	266	5	2	0

Sumber: data diolah dengan SPSS,2025

Berdasarkan tabel 4.4 hasil jawaban responden untuk variabel akuntabilitas (X1) yang terdiri dari 5 butir pernyataan yang disebar kepada 99 responden. Berikut detail dari sebaran jawaban variabel akuntabilitas:

- 1) Pada pernyataan pertama terdapat 44 responden yang menjawab “sangat setuju”, 53 responden yang menjawab “setuju”, 2 responden yang menjawab “kurang setuju” dan tidak ada responden yang menjawab “kurang setuju dan sangat tidak setuju”.
- 2) Pada pernyataan kedua terdapat 36 responden yang menjawab “sangat setuju”, 51 responden yang menjawab “setuju”, 12 responden yang menjawab “kurang setuju” dan tidak ada responden yang menjawab “tidak setuju dan sangat tidak setuju”.
- 3) Pada pernyataan ketiga terdapat 31 responden yang menjawab “sangat setuju”, 60 responden yang menjawab “setuju”, 8 responden yang menjawab “kurang setuju” dan tidak ada responden yang menjawab pernyataan “tidak setuju dan sangat tidak setuju”.
- 4) Pada pernyataan keempat terdapat 30 responden yang menjawab “sangat setuju”, 51 responden yang menjawab “setuju”, 17 responden yang



menjawab “kurang setuju”, 1 responden yang menjawab tidak “tidak setuju” dan tidak ada responden yang menjawab “sangat tidak setuju”.

- 5) Pada pernyataan kelima terdapat responden 27 responden yang menjawab “sangat setuju”, 51 responden yang menjawab “setuju”, 20 responden yang menjawab “kurang setuju”, 1 responden yang menjawab “tidak setuju” dan tidak ada responden yang menjawab “sangat tidak setuju”.

b. Distribusi Jawaban Responden Untuk Variabel Transparansi

Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Kuesioner Transparansi

No	Transparansi	SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Informasi tentang keuangan dana kelurahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya.	71	25	3	0	0
2	Penggunaan keuangan kelurahan baik perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban maupun pengawasan telah dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan atau melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).	58	38	3	0	0
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK-Pembantu) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di kelurahan, bersikap <i>welcome and open management</i> terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi tentang dana kelurahan.	36	60	3	0	0
4	Pemerintah kelurahan sepenuhnya menyadari akan kewajibanya untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka menyeluruh dan jujur kepada masyarakat.	35	60	4	0	0
5	Pemerintah terbuka dalam pengelolaan dana kelurahan sehingga masyarakat mengetahui tentang pengelolaan keuangan kelurahan yang jujur dan benar.	13	71	15	0	0
<b>Total</b>		213	254	28	0	0

Sumber: data diolah dengan SPSS,2025

Berdasarkan tabel 4.5 hasil jawaban responden untuk variabel transparansi (X2) yang terdiri dari 5 butir pernyataan yang disebar kepada 99 responden. Berikut detail dari sebaran jawaban variabel akuntabilitas:

- 1) Pada pernyataan pertama terdapat 71 responden yang menjawab “sangat setuju”, 25 responden yang menjawab “setuju”, 3 responden yang menjawab “kurang setuju” dan tidak ada responden yang menjawab “kurang setuju dan sangat tidak setuju”.
- 2) Pada pernyataan kedua terdapat 58 responden yang menjawab “sangat setuju”, 38 responden yang menjawab “setuju”, 3 responden yang menjawab “kurang setuju” dan tidak ada responden yang menjawab “tidak setuju dan sangat tidak setuju”.
- 3) Pada pernyataan ketiga terdapat 36 responden yang menjawab “sangat setuju”, 60 responden yang menjawab “setuju”, 3 responden yang menjawab “kurang setuju” dan tidak ada responden yang menjawab pernyataan “tidak setuju dan sangat tidak setuju”.
- 4) Pada pernyataan keempat terdapat 35 responden yang menjawab “sangat setuju”, 60 responden yang menjawab “setuju”, 4 responden yang menjawab “kurang setuju”, dan tidak ada responden yang menjawab “tidak setuju dan sangat tidak setuju”.
- 5) Pada pernyataan kelima terdapat 13 responden yang menjawab “sangat setuju”, 71 responden yang menjawab “setuju”, 15 responden yang menjawab “kurang setuju”, dan tidak ada responden yang menjawab “tidak setuju dan sangat tidak setuju”.

c. Distribusi Jawaban Responden Untuk Variabel Partisipasi Masyarakat

Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Kuesioner Partisipasi Masyarakat

No	Partisipasi Masyarakat	SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Pemerintah kelurahan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan.	50	46	3	0	0
2	Masyarakat setuju dengan ikut serta dalam proses pelaksanaan.	46	44	9	0	0
3	Program yang ditetapkan mengacu pada kebutuhan masyarakat.	36	53	10	0	0

4	Pengawasan dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu pelaksanaan program telah berjalan dengan baik.	33	47	18	1	0
5	Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, saran ataupun kritikan terhadap pengelolaan dana kelurahan.	28	47	23	1	0
<b>Total</b>		193	237	63	2	0

Sumber: data diolah dengan SPSS,2025

Berdasarkan tabel 4.6 hasil jawaban responden untuk variabel partisipasi masyarakat (X3) yang terdiri dari 5 butir pernyataan yang disebar kepada 99 responden. Berikut detail dari sebaran jawaban variabel akuntabilitas:

- 1) Pada pernyataan pertama terdapat 50 responden yang menjawab “sangat setuju”, 46 responden yang menjawab “setuju”, 3 responden yang menjawab “kurang setuju” dan tidak ada responden yang menjawab “kurang setuju dan sangat tidak setuju”.
- 2) Pada pernyataan kedua terdapat 46 responden yang menjawab “sangat setuju”, 44 responden yang menjawab “setuju”, 9 responden yang menjawab “kurang setuju” dan tidak ada responden yang menjawab “tidak setuju dan sangat tidak setuju”.
- 3) Pada pernyataan ketiga terdapat 36 responden yang menjawab “sangat setuju”, 53 responden yang menjawab “setuju”, 10 responden yang menjawab “kurang setuju” dan tidak ada responden yang menjawab pernyataan “tidak setuju dan sangat tidak setuju”.
- 4) Pada pernyataan keempat terdapat 33 responden yang menjawab “sangat setuju”, 47 responden yang menjawab “setuju”, 18 responden yang menjawab “kurang setuju”, 1 responden yang menjawab tidak “tidak setuju” dan tidak ada responden yang menjawab “sangat tidak setuju”.
- 5) Pada pernyataan kelima terdapat 28 responden yang menjawab “sangat setuju”, 47 responden yang menjawab “setuju”, 23 responden yang

menjawab “kurang setuju”, 1 responden yang menjawab “tidak setuju” dan tidak ada responden yang menjawab “sangat tidak setuju”.

d. Distribusi Jawaban Responden Untuk Variabel Pengelolaan Dana Kelurahan

Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Kuesioner Pengelolaan Dana Kelurahan

No	Pengelolaan Dana Kelurahan	SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Pemerintah kelurahan sebagai pemegang amanah telah mampu membuat perencanaan dengan melaporkan segala aktivitas dari kegiatan, dibuktikan dengan memberikan pertanggungjawaban dan menyajikan laporan hasil perencanaan.	34	56	9	0	0
2	Pemerintah kelurahan telah mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif juga adil merata.	40	50	9	0	0
3	Pemerintah kelurahan telah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan dana kelurahan dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah juga dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban.	23	44	32	0	0
4	Pemerintah kelurahan membuat dan memberikan laporan yang baik, benar dan tepat waktu atas semua pengelolaan keuangan.	15	49	31	4	0
<b>Total</b>		112	199	81	4	0

Sumber: data diolah dengan SPSS,2025

Berdasarkan tabel 4.7 hasil jawaban responden untuk variabel pengelolaan dana kelurahan (Y) yang terdiri dari 5 butir pernyataan yang disebar kepada 99 responden. Berikut detail dari sebaran jawaban variabel akuntabilitas:

- 1) Pada pernyataan pertama terdapat 34 responden yang menjawab “sangat setuju”, 56 responden yang menjawab “setuju”, 9 responden yang menjawab “kurang setuju” dan tidak ada responden yang menjawab “kurang setuju dan sangat tidak setuju”.
- 2) Pada pernyataan kedua terdapat 40 responden yang menjawab “sangat setuju”, 50 responden yang menjawab “setuju”, 9 responden yang

menjawab “kurang setuju” dan tidak ada responden yang menjawab “tidak setuju dan sangat tidak setuju”.

- 3) Pada pernyataan ketiga terdapat 23 responden yang menjawab “sangat setuju”, 44 responden yang menjawab “setuju”, 32 responden yang menjawab “kurang setuju” dan tidak ada responden yang menjawab pernyataan “tidak setuju dan sangat tidak setuju”.
- 4) Pada pernyataan keempat terdapat 15 responden yang menjawab “sangat setuju”, 49 responden yang menjawab “setuju”, 31 responden yang menjawab “kurang setuju”, 4 responden yang menjawab tidak “tidak setuju” dan tidak ada responden yang menjawab “sangat tidak setuju”.

### C. Pengujian Persyaratan Analisis Data

#### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.<sup>79</sup>

Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	99	13	25	21.06	2.262
X2	99	15	25	21.87	1.872
X3	99	13	25	21.27	2.563
Y	99	13	20	16.23	2.147
Valid N (listwise)	99				

Sumber Data: Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025

Berdasarkan data yang disajikan diatas hasil uji deskriptif dapat kita gambarkan melalui distribusi data yang diperoleh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 207-208

- a. Variabel Akuntabilitas (X1), dari hasil uji diatas dideskripsikan bahwa memiliki jumlah sampel sebanyak 99, dengan nilai minimum sebesar 13, nilai maximum sebesar 25, nilai mean (rata-rata) sebesar 21,06 dan standar deviation atau simpang baku sebesar 2,262. Yang berarti bahwa nilai minimum dan maximum menunjukkan bahwa terdapat rentang nilai yang cukup besar Dimana terdapat variasi dalam persepsi responden tentang akuntabilitas, dan nilai mean (rata-rata) menunjukkan nilai rata-rata yang relative tinggi dimana secara umum responden memiliki persepsi yang positif tentang, sedangkan nilai standar deviation menunjukkan nilai yang relatif kecil yaitu responden memiliki persepsi yang relatif konsisten tentang akuntabilitas. Dengan demikian, hasil uji deskriptif akuntabilitas menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang positif dan konsisten tentang akuntabilitas, artinya pegawai kelurahan data telah akuntabel dan memiliki kinerja yang baik dan dapat dipercaya.
- b. Variabel Transparansi (X2), dari hasil uji diatas dideskripsikan bahwa memiliki jumlah sampel sebanyak 99, dengan nilai minimum sebesar 15, nilai maximum sebesar 25, nilai mean (rata-rata) sebesar 21,87 dan nilai standar deviation atau simpang baku sebesar 1,872. Yang berarti bahwa nilai minimum dan maximum menunjukkan bahwa terdapat rentang yang cukup besar yaitu terdapat variasi dalam persepsi responden tentang transparansi namun variasi tersebut tidak terlalu besar, dan nilai mean (rata-rata) menunjukkan nilai yang relatif tinggi dimana secara umum responden memiliki persepsi yang sangat positif tentang transparansi, sedangkan nilai standar deviation menunjukkan nilai yang relatif kecil yaitu responden memiliki persepsi yang relatif konsisten dan homogen tentang transparansi. Dengan demikian, hasil uji deskriptif transparansi menunjukkan bahwa transparansi telah dilaksanakan dengan baik dan efektif, artinya pegawai kelurahan data telah berhasil dalam menerapkan transparansi dalam

operasionalnya sehingga responden memiliki kepercayaan dan persepsi yang positif tentang transparansi.

- c. Variabel Partisipasi Masyarakat (X3), dari hasil uji diatas dideskripsikan bahwa memiliki jumlah sampel sebanyak 99, dengan nilai minimum sebesar 13, nilai maximum sebesar 25, nilai mean (rata-ratanya) sebesar 21,27 dan nilai standar deviation atau simpang baku sebesar 2,563. Yang berarti bahwa nilai minimum dan maximum menunjukkan bahwa terdapat nilai yang cukup besar yaitu terdapat variasi yang signifikan dalam persepsi responden tentang partisipasi masyarakat, dan nilai mean (rata-rata) memiliki nilai yang relative tinggi menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki persepsi yang positif tentang partisipasi Masyarakat, sedangkan nilai standar deviation menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang cukup bervariasi tentang partisipasi masyarakat. Dengan demikian, hasil uji deskriptif partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan artinya kelurahan data telah berhasil dalam melibatkan Masyarakat dalam namun masih perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat di masa depan.
- d. Variabel Pengelolaan Dana Kelurahan (Y), dari hasil uji diatas dideskripsikan bahwa memiliki jumlah sampel sebanyak 99, dengan nilai minimum 13 dan nilai maximum 20 serta nilai mean (rata-ratanya) sebesar 16,23 sedangkan standar deviation atau simpang baku sebesar 2,147. Yang berarti bahwa nilai minimum dan maximum menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam persepsi responden tentang pengelolaan dana kelurahan namun variasi tersebut tidak terlalu besar, dan nilai mean menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki persepsi yang cukup positif tentang pengelolaan dana kelurahan, sedangkan standar deviation menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang relatif konsisten tentang pengelolaan dana kelurahan. Dengan demikian, hasil uji deskriptif



pengelolaan dana kelurahan menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang cukup positif dan konsisten tentang pengelolaan dana kelurahan. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana kelurahan data telah dilaksanakan dengan cukup baik.

## 2. Uji Validitas

Uji validitas adalah item yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa saja ingin diukur, atau bisa melakukan penelitian langsung dengan metode korelasi person.<sup>80</sup> Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Pada penelitian ini jumlah sampel ( $n$ ) yang akan diuji adalah 34 responden dengan taraf ( $\alpha$ ) 5% dengan ketentuan *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - 2$ ,  $34 - 2 = 32$ , maka didapat  $r$  tabel sebesar 0,198.

Adapun dasar pengambilan dalam uji validitas dapat dilihat dari cara sebagai berikut:

- a. Perbandingan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel
  - Jika nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka valid
  - Jika nilai  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka tidak valid
- b. Melihat nilai signifikan
  - Jika nilai signifikan  $<$  0,05 maka valid
  - Jika nilai signifikan  $>$  0,05 maka tidak valid

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	$r$ Hitung	$r$ Tabel 5%	Sig.	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,752	0,198	0,000	VALID
	X1.2	0,662	0,198	0,000	VALID
	X1.3	0,582	0,198	0,000	VALID
	X1.4	0,768	0,198	0,000	VALID
	X1.5	0,782	0,198	0,000	VALID

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, h. 115



Transparansi (X2)	X2.1	0,691	0,198	0,000	VALID
	X2.2	0,667	0,198	0,000	VALID
	X2.3	0,666	0,198	0,000	VALID
	X2.4	0,798	0,198	0,000	VALID
	X2.5	0,640	0,198	0,000	VALID
Partisipasi Masyarakat (X3)	X3.1	0,756	0,198	0,000	VALID
	X3.2	0,761	0,198	0,000	VALID
	X3.3	0,654	0,198	0,000	VALID
	X3.4	0,850	0,198	0,000	VALID
	X3.5	0,810	0,198	0,002	VALID
Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)	Y1	0,794	0,198	0,000	VALID
	Y2	0,757	0,198	0,000	VALID
	Y3	0,832	0,198	0,000	VALID
	Y4	0,744	0,198	0,000	VALID

Sumber Data: *Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025*

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, hasil uji validitas terhadap variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), partisipasi masyarakat (X3) dan pengelolaan dana kelurahan (Y) dengan menggunakan *person correlations* memperlihatkan semua nilai korelasi r hitung lebih besar dari r tabel (*product moment*), maka semua butir pernyataan tersebut dikatakan valid.

### 3. Uji Reliabilitas

Setelah melewati uji validitas peneliti melakukan uji reliabilitas pada instrument penelitian. Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir pernyataan dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* < 0,60.

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
----	----------	----------------	------------

1	Akuntabilitas	0,740	Reliabel
2	Transparansi	0,729	Reliabel
3	Partisipasi Masyarakat	0,824	Reliabel
4	Pengelolaan Dana Kelurahan	0,783	Reliabel

Sumber Data: *Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025*

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrument dalam penelitian adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Sehingga berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, menunjukkan bahwa instrument memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai koeisien *Cronbach Alpha*  $> 0,60$ , jadi hasil ukur yang akan didapatkan dapat dipercaya.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi memenuhi distribusi normal atau mendekati normal. Jika hasil uji nilai signifikanya di atas 5% (0,05) berarti data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika hasil uji nilainya dibawah 5% maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.65164038
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.044
Test Statistic		.061

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance.	

Sumber Data: *Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025*

Berdasarkan tabel 4.11 diatas hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test diketahui bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari pada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan menunjukkan bahwa asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

apabila nilai VIF >10 dan nilai tolerance <0,1, maka data yang diperoleh dikatakan mengandung multikolinearitas. Apabila nilai VIF <10 dan nilai tolerance >0,1, maka data yang diperoleh dikatakan mengandung multikolinearitas.

Tabel 4.12. Uji Hasil Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>								
		Unstandardized		Standardizd			Collinearity	
		Coefficients		Coefficients			Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerane	VIF
1	(Constant)	6.093	2.051		2.972	.004		
	Akuntabilitas	-.616	.232	-.649	-2.655	.009	.104	9.582
	Transparansi	.146	.144	.127	1.017	.312	.397	2.517
	Partisipasi	.936	.204	1.117	4.580	.000	.105	9.551
	Masyarakat							

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan

Sumber Data: *Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025*

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk variabel independen yang diajukan oleh peneliti untuk diteliti bebas dari multikolinearitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat tabel diatas yang menunjukkan nilai VIF dari masing-masing variabel independen  $< 10,00$  dan nilai *tolerance*  $> 0,1$ .

### c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat diartikan sebagai uji yang dirancang untuk melihat adakah ketidaksamaan dari suatu residual model regresi ke observasi lainnya dengan menggunakan kriteria pengujian yaitu: Apabila nilai *sig*  $> 0.05$  maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sedangkan apabila nilai *sig*  $< 0.05$  maka dapat dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 4.13 Uji Hasil Heterokedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.870	1.137		1.645	.103
	Akuntabilitas	.155	.129	.377	1.202	.232
	Transparansi	-.094	.080	-.189	-1.178	.242
	Partisipasi Masyarakat	-.080	.113	-.223	-.710	.479
a. Dependent Variable: Abs RES						

a. Dependent Variable: Abs RES

Sumber data: *Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025*

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk variabel independen yang diajukan peneliti untuk diteliti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat tabel diatas yang menunjukkan nilai *signifikan* dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi layak untuk

memprediksi pengelolaan dana kelurahan masukan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

#### D. Uji Hipotesis

##### 1. Uji One Sampel T-test

Uji one sampel t test digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai test value dan mengetahui apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dari nilai test value.

##### 1) Variabel X1 (Akuntabilitas)

- Menentukan skor ideal

$$\text{Skor ideal} = 5 \times 99 \times 5 = 2.475$$

- Menentukan nilai rata-rata

$$\bar{X} = \frac{2.085}{99} = 21,06$$

- Menentukan skor total

$$\text{Responden menjawab SS} \quad 168 \times 5 = 840$$

$$\text{Responden menjawab S} \quad 266 \times 4 = 1.064$$

$$\text{Responden menjawab KS yaitu} \quad 59 \times 3 = 177$$

$$\text{Responden menjawab TS} \quad 2 \times 2 = 4$$

$$\text{Tidak ada responden yang menjawab STS} \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{TOTAL} \quad 2.085$$

Tabel 4.14 Hasil Uji One Sampel t Test Variabel Akuntabilitas (X1)

One-Sample Test					
				Test Value = 21	
				95% Confidence Interval of the Difference	
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	
					Lower Upper
Akuntabilitas	.267	98	.790	.06061	-.3906 .5118

Sumber data: Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025

Berdasarkan uji one sampel diatas diperoleh skor ideal sebesar 2.475, nilai rata-rata sebesar 21,06, sehingga nilai yang dihipotesiskan pada variabel akuntabilitas adalah paling tinggi 21% dari nilai ideal. Nilai t sebesar 0,267 menunjukkan bahwa rata-rata sampel tidak berbeda secara signifikan dari nilai yang diketahui atau hipotesis (test value). Nilai sig 0,790 > 0,05 menunjukkan bahwa perbedaan antara rata-rata sampel dan nilai test value tidak signifikan secara statistic. Nilai mean defference sebesar 0,06061 menunjukkan bahwa rata-rata sampel sedikit lebih besar dari nilai test value, dimana Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya hasil uji one sampel t-test menunjukkan bahwa rata-rata sampel konsisten dengan nilai test value.

Dari perhitungan jawaban responden pada pernyataan akuntabilitas diperoleh 2.085 maka  $(2.085 / 2.475 \times 100\% = 84,24\%)$ , 2.085 adalah skor total dan 2.475 adalah skor ideal. Jadi variabel akuntabilitas berada pada 84,24% kategori sangat baik. Hal tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan akuntabilitas pada kantor Kelurahan Data sudah optimal dan bertanggungjawab.

1) Variabel X2 (Transparansi)

- Menentukan skor ideal

$$\text{Skor ideal} = 5 \times 99 \times 5 = 2.475$$

- Menentukan nilai rata-rata

$$\bar{X} = \frac{2.165}{99} = 21,86 \longrightarrow 22$$

- Menentukan skor total

Responden menjawab SS	$213 \times 5 = 1.065$
-----------------------	------------------------

Responden menjawab S	$254 \times 4 = 1.016$
----------------------	------------------------

Responden menjawab KS yaitu	$628 \times 3 = 1.884$
-----------------------------	------------------------

Tidak ada responden yang menjawab TS dan STS	
--	--

TOTAL	3.965
-------	-------

Tabel 4.15 Hasil Uji One Sampel t Test Variabel Transparansi (X2)

One-Sample Test						
				Test Value = 22	95% Confidence Interval of the	
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Difference	
					Lower	Upper
Transparansi	-.698	98	.487	-.13131	-.5046	.2420

Sumber data: *Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025*

Berdasarkan uji one sampel diatas diperoleh skor ideal sebesar 2.475, nilai rata-rata sebesar 22, sehingga nilai yang dihipotesiskan pada variabel transparansi adalah paling tinggi 22% dari nilai ideal. Nilai t sebesar -0,698 menunjukkan bahwa rata-rata sampel tidak berbeda secara signifikan dari nilai yang diketahui atau hipotesis. Nilai sig 0,478 > 0,05 menunjukkan bahwa perbedaan antara rata-rata sampel dan nilai test value tidak signifikan secara statistic. Nilai mean defference sebesar -0,13131 menunjukkan bahwa rata-rata sampel sedikit lebih kecil dari nilai test value tetapi perbedaan ini tidak signifikan, dimana Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya hasil uji one sampel t-test menunjukkan bahwa rata-rata sampel konsisten dengan nilai test value.

Dari perhitungan jawaban responden pada pernyataan akuntabilitas diperoleh 3.965 maka  $(3.965 / 2.475 \times 100\% = 62,42\%)$ , 3.965 adalah skor total dan 2.475 adalah skor ideal. Jadi variabel transparansi berada pada 62,42% kategori sedang. Hal tersebut menjelaskan bahwa transparansi pada kantor Kelurahan Data belum optimal dan masih perlu di tingkatkan.

## 2) Partisipasi Masyarakat (X3)

- Menentukan skor ideal

$$\text{Skor ideal} = 5 \times 99 \times 5 = 2.475$$

- Menentukan nilai rata-rata

$$\bar{X} = \frac{2.106}{99} = 21,27$$

- Menentukan skor total
 

Responden menjawab SS	$193 \times 5 = 965$
Responden menjawab S	$237 \times 4 = 948$
Responden menjawab KS yaitu	$63 \times 3 = 189$
Responden yang menjawab TS	$2 \times 2 = 4$
Tidak ada responden yang menjawab STS	_____
<b>TOTAL</b>	<b>2.106</b>

Tabel 4.16 Hasil Uji One Sampel t Test Variabel Partisipasi Masyarakat (X3)

One-Sample Test						
				Test Value = 21	95% Confidence Interval of the Difference	
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
Partisipasi Masyarakat	1.059	98	.292	.27273	-.2384	.7839

Sumber data: Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025

Berdasarkan uji one sampel diatas diperoleh skor ideal sebesar 2.475, nilai rata-rata sebesar 21,27, sehingga nilai yang dihipotesiskan pada variabel partisipasi masyarakat adalah paling tinggi 21% dari nilai ideal. Nilai t sebesar 1,059 menunjukkan bahwa rata-rata sampel tidak berbeda secara signifikan dari nilai yang diketahui atau hipotesis. Nilai sig 0,292 > 0,05 menunjukkan bahwa perbedaan antara rata-rata sampel dan nilai test value tidak signifikan secara statistic. Nilai mean defference sebesar 0,27273 menunjukkan bahwa rata-rata sampel sedikit lebih besar dari nilai test value tetapi perbedaan ini tidak signifikan, dimana Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya hasil uji one sampel t-test menunjukkan bahwa rata-rata sampel tidak berbeda secara signifikan dari nilai test value.



Dari perhitungan jawaban responden pada pernyataan akuntabilitas diperoleh 2.106 maka  $(2.106 / 2.475 \times 100\% = 85,09\%)$ , 2.106 adalah skor total dan 2.475 adalah skor ideal. Jadi variabel partisipasi masyarakat berada pada 85,09% kategori sangat baik. Hal tersebut menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada kantor Kelurahan Data sudah sepenuhnya dilibatkan, berkontribusi dan berdampak positif.

### 3) Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)

- Menentukan skor ideal

$$\text{Skor ideal} = 5 \times 99 \times 4 = 1.980$$

- Menentukan nilai rata-rata

$$\bar{X} = \frac{1607}{99} = 16,23$$

- Menentukan skor total

$$\text{Responden menjawab SS} \quad 112 \times 5 = 560$$

$$\text{Responden menjawab S} \quad 199 \times 4 = 796$$

$$\text{Responden menjawab KS yaitu} \quad 81 \times 3 = 243$$

$$\text{Responden yang menjawab TS} \quad 4 \times 2 = 8$$

$$\text{Tidak ada responden yang menjawab STS} \quad \text{_____}$$

$$\text{TOTAL} \quad 1.607$$

Tabel 4.17 Hasil Uji One Sampel t Test Variabel Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)

One-Sample Test						
				Test Value = 16	95% Confidence Interval of the Difference	
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
Pengelolaan Dana Kelurahan	1.077	98	.284	.23232	-.1958	.6605

Sumber data: Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025

Berdasarkan uji one sampel diatas diperoleh skor ideal sebesar 1.980, nilai rata-rata sebesar 16,23, sehingga nilai yang dihipotesiskan

pada variabel akuntabilitas adalah paling tinggi 16% dari nilai ideal. Nilai t sebesar 1,077 menunjukkan bahwa rata-rata sampel tidak berbeda secara signifikan dari nilai yang diketahui atau hipotesis. Nilai sig 0,284 > 0,05 menunjukkan bahwa perbedaan antara rata-rata sampel dan nilai test value tidak signifikan secara statistic. Nilai mean difference sebesar 0,23232 menunjukkan bahwa rata-rata sampel sedikit lebih besar dari nilai test value tetapi perbedaan ini tidak signifikan, dimana  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya hasil uji one sampel t-test menunjukkan bahwa rata-rata sampel tidak berbeda secara signifikan dari nilai test value.

Dari perhitungan jawaban responden pada pernyataan akuntabilitas diperoleh 1.607 maka  $(1.607 / 1.980 \times 100\% = 81,16\%)$ , 1.607 adalah skor total dan 1.980 adalah skor ideal. Jadi variabel pengelolaan dana kelurahan berada pada 81,16% kategori baik. Hal tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan dana kelurahan pada kantor Kelurahan Datadapat sudah terlaksana dengan baik, efektif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kelurahan.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk melihat kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen). Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.093	2.051		2.972	.004
	Akuntabilitas	-.616	.232	-.649	-2.655	.009
	Transparansi	.146	.144	.127	1.017	.312

Partisipasi Masyarakat	.936	.204	1.117	4.580	.000
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan					

Sumber Data: *Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025*

Berdasarkan tabel *coefficients* hasil *output SPSS* di atas maka diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots e$$

$$Y = 6,093 + 0,616 + 0,146 + 0,983 + e$$

Dalam persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan secara rinci:

a. Konstanta ( $\alpha$ )

Nilai konstanta atau intercept dalam regresi menunjukkan nilai yang dihasilkan oleh Y (pengelolaan dana kelurahan) ketika ketiga variabel ( $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$ ) bernilai nol. Dalam konteks ini, intercept sebesar 6,093 dapat diartikan sebagai nilai dasar atau titik potong dari garis regresi dengan sumbu Y, artinya jika semua (akuntabilitas  $X_1$ , transparansi  $X_2$  dan partisipasi masyarakat  $X_3 = 0$ ) maka nilai pengelolaan dana kelurahan akan menjadi 6,093. Dalam konteks ini, nilai konstanta menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel independent, pengelolaan dana kelurahan akan memiliki nilai negatif. Hal ini berarti jika tidak ada perubahan dari variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana kelurahan akan menurun sebesar 6,093. Dengan kata lain, pengelolaan dana kelurahan menjadi tidak baik.

b. Koefisien Akuntabilitas ( $X_1$ )

Nilai koefisien regresi untuk akuntabilitas sebesar 0,616. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana kelurahan. Artinya setiap kenaikan 1 satuan dalam tingkat akuntabilitas akan meningkatkan pengelolaan dana kelurahan sebesar 0,616 satuan, dengan asumsi bahwa variabel

independent tetap konstan. Akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan dan hasil yang telah dicapai. Dalam konteks pengelolaan dana kelurahan, akuntabilitas berarti bahwa pengelolaan dana tersebut harus terbuka dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Koefisien Transparansi (X2)

Nilai koefisien regresi untuk transparansi sebesar 0,146. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana kelurahan. Artinya setiap kenaikan 1 satuan transparansi akan meningkatkan pengelolaan dana kelurahan sebesar 0,146 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independent lainnya tetap konstan. Artinya pemerintah kelurahan sudah terbuka mengenai informasi pengelolaan dana kelurahan, jujur dalam mengelola informasi, proses dan keputusan. Sehingga masyarakat dapat mengakses, memantau dan mengevaluasi penggunaan dana tersebut.

d. Koefisien Partisipasi Masyarakat (X3)

Nilai koefisien regresi untuk partisipasi masyarakat sebesar 0,983. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif yang sangat kuat terhadap pengelolaan dana kelurahan. Artinya setiap kenaikan 1 satuan dalam tingkat partisipasi masyarakat akan meningkatkan pengelolaan dana kelurahan sebesar 0,983 satuan. Artinya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pengawasan program atau kegiatan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengelolaan dana kelurahan. Dalam konteks pengelolaan dana kelurahan, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.

### 3. Uji Korelasi Pearson Product Moment

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam koefisien korelasi. Jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif maupun negative.

Tabel 4.19 Uji Korelasi Pearson Product Moment

		<b>Correlations</b>			
		Akuntabilitas	Transparansi	Partisipasi Masyarakat	Pengelolaan Dana Kelurahan
Akuntabilitas	Pearson Correlation	1	.766**	.944**	.503**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99
Transparansi	Pearson Correlation	.766**	1	.765**	.485**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99
Partisipasi Masyarakat	Pearson Correlation	.944**	.765**	1	.602**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99
Pengelolaan Dana Kelurahan	Pearson Correlation	.503**	.485**	.602**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber Data: Hasil Data Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.15 diatas maka diperoleh

- Pada variabel X1 (akuntabilitas) diperoleh nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Kelurahan Data. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,503, hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang positif antara akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan mempunyai tingkat hubungan cukup kuat.
- Pada variabel X2 (transparansi) diperoleh nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi artinya terdapat hubungan yang positif dan

signifikan antara akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Kelurahan Data. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,485, hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang positif antara transparansi terhadap pengelolaan dana kelurahan mempunyai tingkat hubungan cukup kuat.

- c) Pada variabel X3 (partisipasi masyarakat) diperoleh nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Kelurahan Data. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,602 hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang positif antara akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan mempunyai tingkat hubungan kuat.

#### 4. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi pada intinya dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji R<sup>2</sup> berada diantara nol sampai dengan 1 (0-1). Nilai yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati angka satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi dari variabel dependen. Berikut ini adalah hasil dari pengujian Koefisien Determinasi.

Tabel 4.20 Hasil uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.639 <sup>a</sup>	.408	.389	1.67752
a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas				

- Sumber Data: *Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025*

Pada tabel 4.18 diatas, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,408 atau 40,8%. Maka dapat disimpulkan bahwa besaran pengaruh

variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan partisipasi Masyarakat (X3) terhadap pengelolaan dana kelurahan data (Y) sebesar 40,8%, sedangkan sisanya yaitu 61,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5. Uji T-Parsial

Uji parsial (Uji t) pada dasarnya digunakan untuk mengetahui menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau secara parsial dapat menerangkan variasi variabel dependen, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $< 0.05$ , maka secara parsial terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $> 0.05$ , maka secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk nilai  $t_{tabel}$  dapat diketahui dengan menggunakan rumus berikut:

$$t_{tabel} = (\alpha ; (df = n - k))$$

$$t_{tabel} = (0,05; (99 - 4))$$

$$t_{tabel} = (0,05; 95)$$

$$t_{tabel} = 0,197$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

k = Jumlah Variabel

$\alpha$  = 5% (0,05)

Hasil pengujian hipotesis masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21 Hasil Uji T-Parsial

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.093	2.051	2.972	.004
	Akuntabilitas	-.616	.232	-.649	.009
	Transparansi	.146	.144	1.017	.312
	Partisipasi Masyarakat	.936	.204	1.117	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan

Sumber Data: Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas maka data diolah menjadi:

Variabel	Sig.< $\alpha$	Keterangan	Hipotesis
Akuntabilitas	0,009 < 0,05	Signifikan	Diterima
Transparansi	0,312 < 0,05	Signifikan	Ditolak
partisipasi masyarakat	0,000 < 0,05	Signifikan	Diterima

Sumber Data: Data Diolah

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan diketahui bahwa:

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa hasil uji parsial (uji t) :

1. Diketahui nilai  $t_{hitung} 2,655 > t_{tabel} 0,1996$  dan nilai signifikan Akuntabilitas ( $X_1$ ) terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan Data (Y) yaitu  $0.009 < 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan pada perusahaanKelurahan Data.
2. Diketahui nilai  $t_{hitung} 1,017 > t_{tabel} 0,1996$  dan nilai signifikan Transparansi ( $X_2$ ) terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan Data (Y) yaitu  $0,321 > 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan pada perusahaanKelurahan Data.
3. Diketahui nilai  $t_{hitung} 4,580 > t_{tabel} 0,1996$  dan nilai signifikan Partisipasi Masyarakat ( $X_3$ ) terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan Data (Y) yaitu



$0.000 < 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan pada perusahaan Kelurahan Data.

## 6. Uji Simultan F

Uji simultan (Uji F) pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai signifikan  $< 0.05$ , maka secara simultan terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dan nilai signifikan  $> 0.05$ , maka secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk nilai  $F_{tabel}$  dapat diketahui menggunakan rumus berikut:

$$F_{tabel} = F(k ; n - k)$$

$$F_{tabel} = F(3 ; 99 - 4)$$

$$F_{tabel} = F(3 ; 95)$$

$$F_{tabel} = 2,70$$

Keterangan:

$n$  = jumlah sampel

$k$  = jumlah variabel

Tabel 4.22 Hasil Uji Simultan F

ANOVA <sup>a</sup>						
		Sum of				
Model		Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	184.321	3	61.440	21.833	.000 <sup>b</sup>
	Residual	267.336	95	2.814		
	Total	451.657	98			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber Data: Hasil Output SPSS Versi 26, Data Diolah 2025

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditampilkan dalam tabel ANOVA mendukung temuan dari kuesioner yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan uji ANOVA, dengan nilai  $F=21,833$  dan  $p\text{-value}$  0,000, ditemukan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi Masyarakat **secara simultan** berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan.

Tabel 4.23 Kesimpulan Hasil Regresi

Variabel Bebas	Koefisien Regresi ( $\beta$ ) dan F	p-value	Kesimpulan
Akuntabilitas (X1)	0,616	0,009	Signifikan (H1 Diterima)
Transparansi (X2)	0,146	0,312	Tidak signifikan (H2 ditolak)
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,936	0,000	Signifikan (H3 Diterima)
Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3)	21,833	0,000	Signifikan (H4 Diterima)

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dimiliki oleh pemerintah kelurahan, maka semakin baik pula pengelolaan dana kelurahannya. Dalam konteks pengelolaan dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang peran akuntabilitas sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana kelurahan berjalan sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban.

Hal tersebut dibuktikan dengan besaran nilai koefisien akuntabilitas dalam hasil regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam akuntabilitas dapat meningkatkan pengelolaan dana kelurahan. Ini merupakan bukti kuat bahwa akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana kelurahan. Nilai p-value akuntabilitas lebih kecil dari nilai taraf signifikan yang digunakan menegaskan bahwa hubungan ini tidak bersifat kebetulan, melainkan signifikan secara statistik. Dengan kata lain akuntabilitas memang menjadi salah satu variabel penting dalam pengelolaan dana kelurahan.

Penelitian ini melalui lensa teori, yang menggambarkan hubungan antara akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan. Dalam konteks akuntabilitas pegawai kelurahan data telah akuntabel dalam pengelolaan dana kelurahannya dimana berdasarkan jawaban responden pegawai kelurahan data sudah baik dalam mengelola dana kelurahannya, kantor kelurahan data dapat meningkatkan keterbukaan sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana tersebut, mengurangi penyalahgunaan dana kelurahan dengan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku, dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan dan pengelolaan dana Kelurahan Data, kabupaten Pinrang. Mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang dapat dilakukan melalui pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Zulfan Syaputra tahun 2023 dan Rahma Yulita tahun 2023, yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana keuangan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bagus Surya Nur Aditya pada tahun 2023 dengan judul “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan (studi kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkar Kota Semarang)”. yang mengatakan bahwa Kelurahan Karangrejo sudah melaksanakan pengelolaan dengan baik namun belum maksimal, baiknya karena Kelurahan Karangrejo sudah membuat laporan secara berkala lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung untuk laporan kepada pemerintah kota, hasil kurang maksimalnya karena laporan tersebut hanya dibuat untuk pemerintah kota saja sedangkan masyarakat belum memiliki akses yang mudah dalam hal pengelolaan keuangan Kelurahan. Masyarakat juga mengeluhkan belum adanya papan informasi yang dapat dilihat secara langsung yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.

## **2. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana kelurahan, meskipun secara statistik tidak signifikan. Hal ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi yang dimiliki oleh pemerintah Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang maka semakin baik pula pengelolaan dana kelurahan yang dihasilkan. Dalam konteks pengelolaan dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang, hal ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pemerintah kelurahan sudah transparan dan terbuka terhadap pengelolaan dana kelurahan.

Transparansi dalam penelitian ini adalah penjelasan pihak kelurahan tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana kelurahan. Hal tersebut dibuktikan dengan besaran nilai koefisien transparansi. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan transparansi akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan dana kelurahan.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan faktor pendukung pengelolaan keuangan yang baik pada tingkat kelurahan. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat kelurahan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah kelurahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini sangat penting mengingat pemerintah kelurahan mengelola dana publik yang digunakan untuk kepentingan dana publik pula.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan. Hal ini dibuktikan dengan besaran nilai signifikan variabel transparansi yang lebih kecil daripada derajat kesalahan. Hal ini berarti bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan. Data, Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa transparansi merupakan faktor penentu baik dan tidaknya pengelolaan keuangan di Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang. Hal ini disebabkan karena pemerintah kelurahan sudah berusaha untuk informatif, terbuka dalam mengungkapkan dan menyampaikan pengelolaan dana kelurahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dewi tahun 2019 dan hasil penelitian Walyati tahun 2020, yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif yang

signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Faktor ini sangat penting karena kemampuan transparansi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap cara pemerintah kelurahan dalam mengelola dana keuangan. Artinya semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan oleh pemerintah kelurahan, semakin baik pula pertanggungjawaban pemerintah kelurahan dalam pengelolaan dana keuangan. Dimana pemerintah kelurahan memberikan akses yang luas untuk masyarakat dalam memperoleh informasi pengelolaan dana.

### **3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan**

Partisipasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana kelurahan. Hal tersebut dibuktikan dengan besaran nilai koefisien partisipasi. Artinya semakin tinggi tingkat satu kesatuan partisipasi masyarakat maka semakin baik pula pengelolaan dana kelurahan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan partisipasi masyarakat akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan dana kelurahan.

Partisipasi masyarakat yang baik yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana, dengan demikian partisipasi masyarakat dapat mengurangi penyalahgunaan dana kelurahan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang. Hal ini dibuktikan dengan besaran nilai signifikan variabel partisipasi masyarakat yang lebih kecil daripada derajat kesalahan, sehingga pemerintah Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang dalam pengelola dana kelurahan perlu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan dalam pengelolaan dana kelurahan sehingga masyarakat dapat merasa yakin bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu baik dan tidaknya pengelolaan keuangan di Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang. Hal ini disebabkan karena masyarakat dilibatkan bukan saja dalam pengambilan keputusan melainkan juga dalam pelaksanaan keputusan-keputusan, pengambilan manfaat dan pengawasan.

Partisipasi masyarakat yang baik dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana kelurahan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengelolaan dana kelurahan yang baik. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan pengelolaan dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Zulfan Syaputra pada tahun 2023 dan hasil penelitian dari Novita Sari pada tahun 2022, yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

#### **4. Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan di tinjau dari perspektif Akuntansi Syariah**

Dalam akuntansi syariah terdapat beberapa prinsip yang digunakan yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

- a. prinsip pertanggungjawaban, sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an. Maksudnya setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya. Prinsip ini juga berkaitan dengan pengelolaan dana kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dimana pemerintah kelurahan dalam mengelola dana kelurahannya harus memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan

keuangan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan dalam prinsip akuntansi syariah mencakup aspek pertanggungjawaban kepada Allah SWT, sehingga pengelola dana kelurahan harus memastikan bahwa semua tindakan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Pengelola dana kelurahan harus memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan keuangan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak melakukan riba, gharar atau maisir. Pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku Amanah Allah di muka bumi salah satunya dalam Q.S. Al-Baqarah/2:286.

لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ  
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

*“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakan dan terdapat ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatannya) yang diperbuatnya. (Mereka Berdoa) “Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memilkulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir”.*<sup>81</sup>

<sup>81</sup> Departemen Agama RI. 2015. Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah), Al-Baqarah/2:286.



Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap individu pasti akan diminta pertanggungjawaban sejauh kemampuannya, artinya individu yang terlibat dalam proses pengelolaan dana kelurahan harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dikerjakan dan diperbuat. Surah Al-Baqarah menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan yaitu pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta penggunaan dana dengan efektif dan efisien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengelola dana kelurahan harus bertanggungjawab atas tindakan mereka dan memberikan laporan yang akurat, transparan kepada masyarakat.

- b. Prinsip Kebenaran dalam akuntansi syariah memainkan peran penting dalam menciptakan transparansi, kejujuran dan integritas dalam pengelolaan keuangan, serta memastikan bahwa praktik bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Dengan transparansi yang adil, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi pengelolaan dana kelurahan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Pengelola dana kelurahan digunakan secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat tanpa mebeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan transparansi yang adil, konflik antara masyarakat dan pemerintah kelurahan dapat dikurangi karena masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap informasi tentang pengelolaan dana kelurahan. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/5:135.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri,*

*ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*<sup>82</sup>

Ayat ini memiliki hubungan yang erat dengan konsep transparansi karena memaknakan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi dan membuat keputusan. Dengan menjadi penegak keadilan, seseorang dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan tidak memihak. Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai permasalahan yang perlu dikomunikasikan dalam menjalankan tugasnya. Transparansi berarti setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses penganggaran dalam kaitanya dengan kepentingan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan. Masyarakat diharapkan turut serta memantau kegiatan pemerintah kelurahan dengan menerapkan transparansi.

- c. Prinsip keadilan menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Prinsip ini juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam prinsip keadilan yaitu semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, jenis kelamin atau status sosial,

---

<sup>82</sup> Departemen Agama RI. 2015. Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah), An-Nisa/5:135.

masyarakat dapat merasa bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah kelurahan. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/5:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>83</sup>

Ayat ini memiliki hubungan yang erat dengan konsep partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan, yaitu dengan menekankan pentingnya keadilan dan amanat dalam mengelola dana. Partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan kepercayaan, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Ayat ini juga mengajarkan nilai-nilai anti korupsi yang menekankan pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berkehendak menerimanya. Dalam konteks pengelolaan dana kelurahan ini berarti pengelola dana harus bertanggungjawab dan transparan dalam penggunaan dana tersebut. Keterbukaan informasi tentang penggunaan dana akan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan dan pengendalian.

---

<sup>83</sup> Departemen Agama RI. 2015. Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah), An-Nisa/5:58.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang, menggunakan data primer yang pengumpulan datanya diambil melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang, dimana respondenya adalah seluruh masyarakat Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat sedangkan Variabel Dependennya adalah Pengelolaan Dana Kelurahan. Setelah melakukan beberapa uji hipotesis, maka penulis menyimpulkan hasil analisisnya sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan. Berdasarkan hasil uji one sampel t-test bahwa pemerintah kelurahan sudah akuntabel dan sangat baik dalam pengelolaan dana kelurahan.
2. Transparansi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan dana Kelurahan Data tetapi tidak signifikan. Artinya Kantor Kelurahan Data secara penuh belum transparansi terhadap masyarakat dalam pengelolaan dana di Kelurahan Data.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan. Berdasarkan hasil uji one sampel t-test bahwa partisipasi masyarakat sangat baik dalam pengelolaan dana kelurahan, dan berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan bahwa H3 bernilai positif atau sangat baik. Artinya masyarakat sudah dilibatkan dan berkontribusi dalam pengelolaan dana Kelurahan Data.
4. Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan. Artinya ketiga faktor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan dana Kelurahan Data yang efektif

dan efisien, dan menentukan seberapa baik pemerintah kelurahan dalam mengelola dana kelurahanya.

## **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu berikut adalah beberapa saran bagi peneliti selanjutnya atau beberapa pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas atau menambah populasi dan sampel penelitian
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.
3. Bagi Kantor Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang, diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana keluraha

## DAFTAR PUSTAKA

- ABD Hamid, Musmulyadi dan Damirah. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keuangan Masyarakat di Desa Tangru Kabupaten Enrekang”, Jurnal *The Seybold Report*, ISSN 1533-9211, 2023.
- Andi Ayu Frihatni, Nirwana dan Syamsuddin. “Penerapan Standar Akuntansi dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 4, Nomor 3, 2021.
- Bagus Surya Nur Aditya. “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan”, Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2023.
- Departemen Agama RI. 2015. Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah).
- Effendi. *Bentuk Partisipasi*. (dalam sari, 2016).
- Fauziyah, Miftahul Reza. “Pengaruh Penyajian dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, 2021.
- Hamijoyo. “Partisipasi Dalam Pembangunan”. Jakarta: Depdikbud, 2007.
- Hamta, F. “Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Akuntansi”. Edisi Pertama. Deepublish, 2015
- Hendra Karianga. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Keuangan Daerah”, Bandung; PT. Alumni., 2011.
- Husein Umar. “Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis”, Jakarta: Rajawali, 2013, h.20
- Indrayani, “Modul Akuntansi Dasar”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.
- James M Reeve. “Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia”, Edisi Terjemahan; Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Kristianten. “Transparansi Anggaran Pemerintah”, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Kumalasri, D., & Riharjo, I. B. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasidana Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1-15.
- Mahmudi. “Manajemen Keuangan”, Jakarta: Erlangga, 2010

- Mardiasmo. *“Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Muammar Khaddafi dkk. *“Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi”*, Medan: Madenatera), 2016.
- Muhammad. *“Pengantar Akuntansi Syariah”*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Muhammad Akhyar Adnan. *“Akuntansi Syariah: Arah, Prospek, Dan Tantangannya”*, Yogyakarta: UI Press, 2005.
- Muhammad Darwin. *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, Bandung; CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Muhammad Kamal Zubair and dkk. *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020 (IAIN Parepare Nusantara Press)”*, 2020.
- Nana Sudjana. *“Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah”*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018.
- Nofrizal Rifandi. *“Akuntabilitas Anggaran Dana Desa”*, Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Novita Sari. *“Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambek Kabupaten Deli Serdang”*, Skripsi Sarjana: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, 2022.
- Ny Latifah dkk. *“Dasar-Dasar Akuntansi Syariah”*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022.
- Octafiani Clara Sanger. *“Analisis Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Kelurahan Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Kelurahan Titiwungen Selatan”*, Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya, vol 7 No. 4, 2023
- Rahma yulita, Nurlailah. *“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipas Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur”*, Jurnal Kolaboratif Sains volume 6 ISSUE 12), 2023.
- Riady Al Fajri, *“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan”*, Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2022.
- Rina Haliza Nasution. *“Analisis transparansi dan akuntabilitas terhadap dana kelurahan (studi kasus Kantor Lurah Karang Berombak. Kecamatan Medan Barat, Kota Medan”*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, vol 2 N0.4, 2024.



- Rosjidi. *"Akuntabilitas Sektor Publik"*, Surabaya: Aksara Satu, 2001.
- Rukminto Adi, Isbandi. *"Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat"*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Saren, Christine Monica, Tinangon, Jantje J. *"Studi Program Akuntansi, Magister Ekonomi Fakultas Bisnis. Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung"*, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing GOODWILL, 13(1), 101-112, 2022.
- Syafian Lailan and Nurlaila Harahap. *"Metode Penelitian Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif"* (Medan: FEBI UIN-SU Press), 2019.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sri Kasnelly. *"Teori Dan Praktek Akuntansi Syariah," AL-AMAL: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol. 1, no. 1, 2021.
- Sri Wahyuni Nur, *"Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tellumpanue Kabupaten Maros"*, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis 2021 Universitas Muhammadiyah Jeber, 2021.
- Sugiyono. *"Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&B"*, Bandung; Alfabeta, 2012.
- Sukendra I & I Kadek. *"Instrument Penelitian 2020"* Pontianak; Mahameru Press fendi. Bentuk Partisipasi, 2020.
- Syofian Siregar. *"Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17"*, Jakarta ; PT Bumi Aksara, 2015.
- Tim Penyusun. *"Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005"*, Bandung: Fokus Media. 2009.
- Umi Purwanti. *"Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan"*, vol 3.2, 2021.
- Wahyudi. *"Akuntabilitas Instansi Pemerintah"*, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKB, 2011.
- Waluyo. *"Manajemen Publik Konsep, Aplikasi, dan Implemtasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah"*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Yusri, SH, M.Si. *"Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa"*, Bandung: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023



Zulfan Syaputra, *“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi Sarjana: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah, 2023.



# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)  
21307**

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**NAMA : NURILA RAMADANI. U**

**NIM : 19.62202.067**

**FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PRODI : AKUNTANSI SYARIAH**

**JUDUL : PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP  
PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DATA  
KABUPATEN PINRANG**

**KUESIONER PENELITIAN**

**Kepada Yth.**

**Bapak/Ibu/Saudara/i**

**Di Tempat**

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Bapak/Ibu/Saudara/I dalam rangka menyelesaikan karya (skripsi) pada Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) maka saya,

Nama : Nurila Ramadani. U

Nim : 19.62202.067

Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, peneliti memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Atas ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner ini, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Hormat saya,



NURILA RAMADANI. U

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ PerempuanPendidikan Terakhir : ☐ SMP ☐ SMA/SLTA/MA ☐ S1/S2**PETUNJUK PENGISIAN:**

1. Bacalah pernyataan dengan teliti
2. Isilah salah satu jawaban menurut pendapat anda dengan memberi tanda (√) pada tempat yang disediakan.
3. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban saja

Keterangan pilihan jawaban

SS : Sangat Setuju = 5      TS : Tidak Setuju = 2  
 S : Setuju = 4      STS : Sangat Tidak Setuju = 1  
 KS : Kurang Setuju = 3

**DAFTAR PERNYATAAN**

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
<b>A.</b>	<b>AKUNTABILITAS (X1)</b>					
1.	Pemerintah kelurahan harus memiliki prosedur hukum pedoman dana kelurahan sebagai landasan dalam pembuatan keputusan.					

2.	Proses penetapan program-program dana kelurahan dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran.					
3.	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam penggunaan dana kelurahan.					
4.	Pemerintah kelurahan telah mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada pihak melalui laporan pertanggungjawaban.					
5.	Pertanggungjawaban tim pengelola dana kelurahan kepada masyarakat melalui laporan realisasi dana kelurahan.					
<b>B.</b>	<b>TRANSPARANSI (X2)</b>					
1.	Informasi tentang keuangan dana kelurahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya.					
2.	Penggunaan keuangan kelurahan baik perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban maupun pengawasan telah dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan atau melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).					
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK-Pembantu) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di kelurahan, bersikap <i>welcome and open management</i> terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi tentang dana kelurahan.					

4.	Pemerintah kelurahan sepenuhnya menyadari akan kewajibanya untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka menyeluruh dan jujur kepada masyarakat.					
5.	Pemerintah terbuka dalam pengelolaan dana kelurahan sehingga masyarakat mengetahui tentang pengelolaan keuangan kelurahan yang jujur dan benar.					
<b>C.</b>	<b>PARTISIPASI MASYARAKAT (X3)</b>					
1.	Pemerintah kelurahan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan.					
2.	Masyarakat setuju dengan ikut serta dalam proses pelaksanaan kegiatan.					
3.	Program yang ditetapkan mengacu pada kebutuhan masyarakat.					
4.	Pengawasan dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu pelaksanaan program telah berjalan dengan baik.					
5.	Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, saran ataupun kritikan terhadap pengelolaan dana kelurahan.					
<b>D.</b>	<b>PENGELOLAAN DANA KELURAHAN (Y)</b>					
1.	Pemerintah kelurahan sebagai pemegang amanah telah mampu membuat perencanaan dengan melaporkan segala aktivitas dari kegiatan, dibuktikan dengan memberikan pertanggungjawaban dan menyajikan laporan hasil perencanaan.					

2.	Pemerintah kelurahan telah mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif juga adil merata.					
3.	Pemerintah kelurahan telah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan dana kelurahan dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah juga dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban.					
4.	Pemerintah kelurahan membuat dan memberikan laporan yang baik, benar dan tepat waktu atas semua pengelolaan keuangan.					

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 02 Mei 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama

(Dr. Zaipal Sald, M.H. )

NIP. 19761118 2005011002

Pembimbing Pendamping

(Dr. Andi Ayu Prihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA )

NIDN. 2003029203



Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

---

Nomor : B-2213/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025 22 Mei 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURILA RAMADANI. U
Tempat/Tgl. Lahir	: DATA, 24 November 2001
NIM	: 19.62202.067
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: SALUBONE, KELURAHAN DATA, KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DATA, KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,  
  
Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Dari Dinas/PEMDA



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0314/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2025

Tentang  
**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23-05-2025 atas nama NURILA RAMADANI. U, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0433/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2025, Tanggal : 23-05-2025  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0304/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2025, Tanggal : 23-05-2025

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :  
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare  
3. Nama Peneliti : NURILA RAMADANI. U  
4. Judul Penelitian : PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DATA KABUPATEN PINRANG  
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan  
6. Sasaran/target Penelitian : Pegawai Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Data Kab. Pinrang  
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-11-2025.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 05 Juni 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANL AP. M.SI**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



CERTIFIED  
E-SIGNATURE  
SYSTEM  
URS



ZONA  
HIJAU



OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DPMPTSP**

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Meneliti Dari Instansi

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN DUAMPANUA**  
**KELURAHAN DATA**  
Jl. Poros Pinrang - Polman No. Kode Pos 91253

---

**SURAT KETERANGAN SELESAL PENELITIAN**  
Nomor : 113 / KD / VI / 2025

Sehubungan dengan surat dari Kepada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, Nomor : 503 / 0314 / PENELITIAN / DPMPSTP / 06 / 2025, Hal ini izin Mengadakan Penelitian Tertanggal 05 Juni 2025, Maka Dengan Ini Menerangkan Nama Mahasiswi Di Bawah Ini :

N a m a	: NURILA RAMADANI
Nim	: 19.62202.067
Prodi	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenjang	: S1

Benar telah mengadakan Penelitian di Kel. Data, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang. Guna Melengkapi Data Pada Penyusunan Skripsi yang Berjudul "PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DATA KABUPATEN PINRANG"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Data, 23 Juni 2025

  
**RAEATSA, SH., M. M**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19770705 200604 2 033





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**BERITA ACARA  
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURILA RAMADANI. U  
N I M : 19.62202.067  
Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

**PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK, MATURITAS UTANG TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK KPP KOTA PAREPARE**

Telah diganti dengan judul baru:

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DATA,  
KABUPATEN PINRANG**

dengan alasan / dasar:

*Judul sebelumnya di tolak karena judul tersebut / sebelumnya  
data yang diminta bersifat privasi.*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juli 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Zainal Said, M.H.

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak, CTA.,  
ACPA.



Prof. Dr. Maznah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197102082001122002

Lampiran 6 Data Hasil Penelitian Variabel Akuntabilitas (X1)

Responden	akuntabilitas					
	1	2	3	4	5	Total
1	4	4	4	4	4	20
2	5	4	5	5	5	24
3	4	4	4	4	4	20
4	5	5	3	5	4	22
5	4	4	4	4	5	21
6	4	4	5	5	5	23
7	4	4	4	4	4	20
8	5	5	4	5	5	24
9	4	4	4	3	4	19
10	5	5	4	4	4	22
11	5	5	5	5	5	25
12	5	4	4	4	4	21
13	5	5	5	4	3	22
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	5	5	22
16	5	4	5	4	4	22
17	5	5	5	4	5	24
18	5	5	4	4	4	22
19	5	5	5	5	5	25
20	4	4	4	4	4	20
21	5	3	5	4	4	21
22	4	5	5	4	4	22
23	5	5	4	5	5	24
24	4	4	5	5	4	22
25	5	4	4	5	5	23
26	5	5	4	5	4	23
27	4	4	4	4	4	20
28	5	4	4	5	5	23
29	5	4	4	5	5	23
30	4	5	5	5	4	23
31	5	5	4	5	5	24
32	5	4	4	4	4	21
33	4	4	5	4	5	22
34	5	4	4	4	5	22
35	5	5	4	4	5	23

36	4	4	4	4	4	20
37	5	5	4	4	4	22
38	5	5	5	5	5	25
39	5	3	4	5	5	22
40	4	5	4	3	4	20
41	4	4	3	5	4	20
42	5	5	4	4	4	22
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	4	3	5	3	3	18
46	4	4	4	4	3	19
47	4	3	4	4	4	19
48	5	4	5	4	4	22
49	4	4	4	5	4	21
50	4	4	5	5	4	22
51	5	5	5	4	4	23
52	5	5	4	5	5	24
53	4	4	5	4	4	21
54	5	4	4	4	5	22
55	4	4	4	4	4	20
56	5	5	5	4	3	22
57	5	5	5	4	4	23
58	4	4	5	4	4	21
59	4	5	5	4	4	22
60	5	5	4	4	4	22
61	5	5	4	5	5	24
62	5	5	4	4	3	21
63	4	4	4	3	3	18
64	4	4	4	3	3	18
65	5	4	4	4	4	21
66	4	5	5	4	4	22
67	4	4	3	4	4	19
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	3	3	18
70	4	4	4	3	3	18
71	4	5	5	5	4	23
72	5	4	5	5	4	23
73	4	5	4	4	4	21
74	4	5	4	4	4	21

75	5	4	4	5	3	21
76	4	5	4	4	3	20
77	4	5	4	3	4	20
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	4	5	4	23
80	4	3	4	5	3	19
81	4	4	3	3	3	17
82	4	4	4	3	4	19
83	4	4	5	4	3	20
84	5	5	4	5	5	24
85	5	3	5	5	5	23
86	5	5	5	4	5	24
87	5	3	5	4	5	22
88	4	3	4	4	3	18
89	5	4	5	3	5	22
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	4	4	3	19
92	4	4	4	3	4	19
93	4	4	4	3	4	19
94	4	4	4	4	4	20
95	3	3	3	2	2	13
96	3	3	3	3	3	15
97	4	4	4	3	3	18
98	4	3	3	3	3	16
99	4	3	3	3	3	16

Lampiran 7 Data Hasil Penelitian Variabel Transparansi (X2)

Responden	Transparansi					total
	1	2	3	4	5	
1	5	5	4	4	4	22
2	5	4	5	5	5	24
3	4	4	4	4	4	20
4	5	5	3	4	5	22
5	5	5	5	4	4	23
6	4	4	5	5	5	23
7	5	5	5	4	4	23
8	5	5	4	5	5	24
9	4	4	4	4	3	19
10	5	5	5	5	4	24
11	5	5	5	5	4	24
12	5	5	4	4	4	22
13	5	4	4	4	3	20
14	5	5	4	4	4	22
15	5	5	5	5	4	24
16	5	5	5	4	4	23
17	5	5	5	5	4	24
18	5	5	4	4	4	22
19	5	5	5	5	4	24
20	5	5	4	4	4	22
21	5	4	4	4	3	20
22	5	5	4	5	5	24
23	5	5	4	5	5	24
24	5	5	4	4	4	22
25	5	5	5	5	5	25
26	5	4	5	4	4	22
27	4	5	4	4	4	21
28	5	5	5	5	4	24
29	5	5	5	5	5	25
30	5	5	5	5	4	24
31	5	4	5	5	4	23
32	5	4	4	4	4	21
33	4	5	5	5	4	23
34	5	4	5	5	4	23
35	5	4	5	4	4	22



36	4	5	4	4	3	20
37	5	5	4	4	4	22
38	5	5	5	5	5	25
39	5	5	4	5	5	24
40	4	5	4	5	4	22
41	4	4	5	4	4	21
42	5	5	4	4	4	22
43	4	4	4	4	4	20
44	5	4	4	4	4	21
45	5	5	5	5	4	24
46	5	5	5	5	3	23
47	4	4	4	4	3	19
48	5	4	5	4	4	22
49	5	4	4	4	4	21
50	4	5	5	5	4	23
51	5	5	4	4	4	22
52	5	5	4	5	3	22
53	5	4	5	4	4	22
54	5	5	5	5	4	24
55	4	4	4	4	4	20
56	5	5	4	4	3	21
57	5	5	5	5	4	24
58	5	4	4	4	4	21
59	5	5	5	4	4	23
60	5	5	4	4	4	22
61	5	5	5	5	4	24
62	5	5	4	4	4	22
63	5	5	4	4	4	22
64	5	5	4	4	3	21
65	5	4	4	4	4	21
66	5	5	4	4	4	22
67	5	5	4	4	4	22
68	4	4	4	4	4	20
69	5	5	4	4	4	22
70	5	5	4	4	4	22
71	5	5	5	4	4	23
72	5	4	5	5	4	23
73	4	5	4	4	4	21
74	4	5	4	4	4	21

75	5	4	5	5	4	23
76	5	5	4	4	4	22
77	4	5	4	5	4	22
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	4	5	4	23
80	4	5	4	4	3	20
81	4	4	5	4	4	21
82	5	4	4	4	4	21
83	4	4	4	3	3	18
84	5	5	5	5	4	24
85	5	4	4	5	5	23
86	5	4	4	5	5	23
87	5	4	4	4	4	21
88	5	4	4	3	3	19
89	5	5	4	4	4	22
90	5	4	4	4	4	21
91	4	4	4	4	4	20
92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	4	4	20
95	4	3	3	3	4	17
96	3	3	3	3	3	15
97	4	4	4	4	4	20
98	3	3	4	4	3	17
99	3	4	4	4	3	18

Lampiran 8 Data Hasil Penelitian Variabel Partisipasi Masyarakat (X3)

Responden	Partisipasi Masyarakat					total
	1	2	3	4	5	
1	5	5	4	4	3	21
2	5	4	5	5	5	24
3	4	4	4	4	4	20
4	5	5	3	5	4	22
5	4	4	4	4	5	21
6	4	4	5	5	5	23
7	4	4	5	5	5	23
8	5	5	4	5	5	24
9	4	4	4	3	4	19
10	5	5	5	5	4	24
11	5	5	5	5	5	25
12	5	4	4	4	4	21
13	5	5	5	4	3	22
14	4	4	3	4	4	19
15	5	5	4	5	5	24
16	5	4	5	4	4	22
17	5	5	5	4	5	24
18	5	5	4	4	4	22
19	5	5	5	5	5	25
20	5	5	4	4	4	22
21	5	3	5	4	4	21
22	5	5	5	4	4	23
23	5	5	4	5	5	24
24	4	4	5	5	4	22
25	5	5	5	5	5	25
26	5	5	4	5	4	23
27	4	4	4	4	4	20
28	5	4	4	5	5	23
29	5	5	5	5	5	25
30	5	5	5	5	4	24
31	5	5	4	5	5	24
32	5	4	4	4	4	21
33	4	4	5	4	5	22
34	5	5	5	4	5	24
35	5	5	4	4	5	23

36	4	4	4	4	4	20
37	5	5	4	4	3	21
38	5	5	5	5	5	25
39	5	5	4	5	5	24
40	4	5	4	3	4	20
41	4	4	3	5	4	20
42	5	5	4	4	4	22
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	4	3	5	3	3	18
46	4	4	4	4	3	19
47	4	3	4	4	4	19
48	5	4	5	4	4	22
49	4	4	4	5	4	21
50	4	4	5	5	4	22
51	5	5	5	4	4	23
52	5	5	4	5	5	24
53	4	4	5	4	4	21
54	5	4	4	4	5	22
55	4	4	4	4	4	20
56	5	5	5	4	3	22
57	5	5	5	4	4	23
58	4	4	5	4	4	21
59	4	5	5	4	4	22
60	5	5	4	4	4	22
61	5	5	4	5	5	24
62	5	5	4	4	3	21
63	4	4	4	3	3	18
64	4	4	4	3	3	18
65	5	4	4	4	4	21
66	4	5	5	4	4	22
67	4	4	3	4	4	19
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	3	3	18
70	4	4	4	3	3	18
71	4	5	5	5	4	23
72	5	4	5	5	4	23
73	4	5	4	4	4	21
74	4	5	4	4	4	21

75	5	4	4	3	3	19
76	4	5	4	4	3	20
77	4	5	4	3	4	20
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	4	5	4	23
80	4	3	4	3	3	17
81	4	4	3	3	3	17
82	4	4	4	3	4	19
83	4	4	5	4	3	20
84	5	5	4	5	5	24
85	5	5	5	5	5	25
86	5	5	5	5	5	25
87	5	5	5	5	5	25
88	3	4	4	4	3	18
89	5	5	5	5	5	25
90	5	4	4	4	3	20
91	4	4	4	4	3	19
92	4	4	4	3	4	19
93	4	4	4	3	4	19
94	4	4	4	4	4	20
95	3	3	3	2	2	13
96	3	3	3	3	3	15
97	4	3	3	3	3	16
98	4	3	3	3	3	16
99	4	3	3	3	3	16

Lampiran 9 Data Hasil Penelitian Variabel Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)

Responden	Pengelolaan Dana Kelurahan				total
	1	2	3	4	
1	5	4	4	4	17
2	4	5	4	4	17
3	4	4	3	3	14
4	4	5	5	5	19
5	4	4	3	3	14
6	4	4	3	3	14
7	5	5	4	3	17
8	5	5	4	5	19
9	3	4	3	3	13
10	5	5	5	4	19
11	5	5	5	5	20
12	4	3	4	4	15
13	4	4	5	3	16
14	4	4	3	3	14
15	5	4	5	4	18
16	5	5	5	4	19
17	5	5	5	4	19
18	4	4	3	3	14
19	5	5	5	4	19
20	5	5	5	5	20
21	4	4	3	3	14
22	5	5	5	4	19
23	5	5	5	4	19
24	5	5	4	3	17
25	5	5	4	5	19
26	5	5	5	4	19
27	4	4	3	3	14
28	5	4	4	5	18
29	5	5	5	4	19
30	5	5	5	4	19
31	4	4	5	4	17
32	5	5	4	3	17
33	5	5	4	4	18

34	5	4	5	5	19
35	5	5	4	4	18
36	4	3	3	3	13
37	4	4	3	3	14
38	4	4	4	5	17
39	5	5	5	5	20
40	4	4	4	3	15
41	4	4	3	4	15
42	4	5	4	5	18
43	3	4	4	3	14
44	3	3	4	3	13
45	4	4	3	3	14
46	3	4	3	3	13
47	3	4	3	3	13
48	4	3	3	4	14
49	5	5	5	5	20
50	4	4	3	3	14
51	4	4	3	3	14
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	4	5	4	4	17
55	4	4	3	3	14
56	4	5	4	4	17
57	4	4	4	4	16
58	5	5	5	5	20
59	5	5	4	4	18
60	4	4	4	4	16
61	4	5	4	4	17
62	5	5	4	4	18
63	4	5	3	3	15
64	4	4	3	3	14
65	4	4	4	4	16
66	4	5	4	4	17
67	4	4	4	4	16
68	4	4	4	2	14
69	4	4	4	4	16
70	5	5	4	4	18
71	4	5	4	4	17
72	4	3	4	4	15

73	4	4	3	4	15
74	4	4	3	4	15
75	4	4	4	2	14
76	4	4	3	4	15
77	4	4	3	4	15
78	5	5	4	3	17
79	5	5	5	5	20
80	3	4	3	4	14
81	4	4	3	2	13
82	4	5	3	4	16
83	4	4	3	3	14
84	5	5	3	2	15
85	4	4	5	3	16
86	5	5	3	3	16
87	5	5	5	5	20
88	4	3	4	3	14
89	5	5	5	5	20
90	3	3	3	4	13
91	4	4	4	4	16
92	4	4	4	4	16
93	4	4	4	4	16
94	4	4	4	4	16
95	4	3	3	3	13
96	4	4	4	4	16
97	4	4	4	4	16
98	3	3	4	4	14
99	3	4	4	4	15

PAREPARE



## Lampiran 10 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	99	13	25	21.06	2.262
X2	99	15	25	21.87	1.872
X3	99	13	25	21.27	2.563
Y	99	13	20	16.23	2.147
Valid N (listwise)	99				

## Lampiran 11 Uji Validitas Akuntabilitas

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	total
X1.1	Pearson Correlation	1	.401**	.300**	.489**	.526**	.752**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X1.2	Pearson Correlation	.401**	1	.224*	.291**	.276**	.622**
	Sig. (2-tailed)	.000		.026	.003	.006	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X1.3	Pearson Correlation	.300**	.224*	1	.280**	.311**	.582**
	Sig. (2-tailed)	.003	.026		.005	.002	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X1.4	Pearson Correlation	.489**	.291**	.280**	1	.566**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.005		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X1.5	Pearson Correlation	.526**	.276**	.311**	.566**	1	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.002	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99
Total	Pearson Correlation	.752**	.622**	.582**	.768**	.782**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

## Lampiran 12 Uji Validitas Transparansi

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	total
X2.1	Pearson Correlation	1	.459**	.301**	.308**	.339**	.691**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.002	.001	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X2.2	Pearson Correlation	.459**	1	.228*	.394**	.209*	.667**
	Sig. (2-tailed)	.000		.023	.000	.037	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X2.3	Pearson Correlation	.301**	.228*	1	.582**	.203*	.666**
	Sig. (2-tailed)	.002	.023		.000	.044	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X2.4	Pearson Correlation	.308**	.394**	.582**	1	.476**	.798**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X2.5	Pearson Correlation	.339**	.209*	.203*	.476**	1	.640**
	Sig. (2-tailed)	.001	.037	.044	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99
Total	Pearson Correlation	.691**	.667**	.666**	.798**	.640**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

## Lampiran 13 Uji Validitas Partisipasi Masyarakat

		<b>Correlations</b>					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	total
X3.1	Pearson Correlation	1	.603**	.365**	.540**	.477**	.756**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X3.2	Pearson Correlation	.603**	1	.356**	.537**	.460**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X3.3	Pearson Correlation	.365**	.356**	1	.429**	.393**	.654**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X3.4	Pearson Correlation	.540**	.537**	.429**	1	.695**	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
X3.5	Pearson Correlation	.477**	.460**	.393**	.695**	1	.810**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99
Total	Pearson Correlation	.756**	.761**	.654**	.850**	.810**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

## Lampiran 14 Uji Validitas Pengelolaan Dana Kelurahan

		<b>Correlations</b>				
		Y1	Y2	Y3	Y4	total
Y1	Pearson Correlation	1	.663**	.544**	.354**	.794**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99
Y2	Pearson Correlation	.663**	1	.451**	.330**	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000
	N	99	99	99	99	99
Y3	Pearson Correlation	.544**	.451**	1	.559**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99
Y4	Pearson Correlation	.354**	.330**	.559**	1	.744**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000
	N	99	99	99	99	99
total	Pearson Correlation	.794**	.757**	.832**	.744**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Lampiran 15 Uji Reliabilitas

- Variabel Akuntabilitas (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.740	5

- Variabel Transparansi (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.729	5

- Variabel Partisipasi Masyarakat (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.824	5

- Variabel Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.783	4

## Lampiran 16 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.65164038
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.044
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Lampiran 17 Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.093	2.051		2.972	.004		
	Akuntabilitas	-.616	.232	-.649	-2.655	.009	.104	9.582
	Transparansi	.146	.144	.127	1.017	.312	.397	2.517
	Partisipasi Masyarakat	.936	.204	1.117	4.580	.000	.105	9.551
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan								



Lampiran 18 Uji Heterokedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1.870	1.137		.103
	Akuntabilitas	.155	.129	.377	.232
	Transparansi	-.094	.080	-.189	.242
	Partisipasi Masyarakat	-.080	.113	-.223	.479
a. Dependent Variable: Abs_RES					



# Lampiran 19 Uji One Sampel T-test

- Akuntabilitas

One-Sample Test						
				Test Value = 21	95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
Akuntabilitas	.267	98	.790	.06061	-.3906	.5118

- Transparansi

One-Sample Test						
				Test Value = 22	95% Confidence Interval of the Difference	
	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
Transparansi	-.698	98	.487	-.13131	-.5046	.2420

- Partisipasi Masyarakat

One-Sample Test						
				Test Value = 21	95% Confidence Interval of the Difference	
	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
Partisipasi Masyarakat	1.059	98	.292	.27273	-.2384	.7839

- Pengelolaan Dana Kelurahan

One-Sample Test						
				Test Value = 16	95% Confidence Interval of the Difference	
	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
Pengelolaan Dana Kelurahan	1.077	98	.284	.23232	-.1958	.6605

Lampiran 20 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.093	2.051		2.972	.204
	X1	-.616	.232	-.649	-2.655	.069
	X2	.146	.144	.127	1.017	.312
	X3	.936	.204	1.117	4.580	.415
a. Dependent Variable: Y						



Lampiran 21 Uji Korelasi Pearson Product Moment

		Correlations			
		Akuntabilitas	Transparansi	Partisipasi Masyarakat	Pengelolaan Dana Kelurahan
Akuntabilitas	Pearson Correlation	1	.766**	.944**	.503**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99
Transparansi	Pearson Correlation	.766**	1	.765**	.485**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99
Partisipasi Masyarakat	Pearson Correlation	.944**	.765**	1	.602**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99
Pengelolaan Dana Kelurahan	Pearson Correlation	.503**	.485**	.602**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).					

Lampiran 22 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.639 <sup>a</sup>	.408	.389	1.67752
a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas				

Lampiran 23 Uji T-Parsial

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.093	2.051		2.972	.004
	Akuntabilitas	-.616	.232	-.649	-2.655	.009
	Transparansi	.146	.144	.127	1.017	.312
	Partisipasi Masyarakat	.936	.204	1.117	4.580	.000
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan						



## Lampiran 24 Uji Simultan F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	184.321	3	61.440	21.833	.000 <sup>b</sup>
	Residual	267.336	95	2.814		
	Total	451.657	98			
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan						
b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas						



Lampiran 25 nilai tingkat signifikan T tabel

DF = n-2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
	r 0,005	r 0,05	r 0,025	r 0,01	r 0,001
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211
101	0.1630	0.1937	0.2290	0.2528	0.3196
102	0.1622	0.1927	0.2279	0.2515	0.3181
103	0.1614	0.1918	0.2268	0.2504	0.3166
104	0.1606	0.1909	0.2257	0.2492	0.3152
105	0.1599	0.1900	0.2247	0.2480	0.3137
106	0.1591	0.1891	0.2236	0.2469	0.3123
107	0.1584	0.1882	0.2226	0.2458	0.3109
108	0.1576	0.1874	0.2216	0.2446	0.3095
109	0.1569	0.1865	0.2206	0.2436	0.3082
110	0.1562	0.1857	0.2196	0.2425	0.3068
111	0.1555	0.1848	0.2186	0.2414	0.3055
112	0.1548	0.1840	0.2177	0.2403	0.3042
113	0.1541	0.1832	0.2167	0.2393	0.3029
114	0.1535	0.1824	0.2158	0.2383	0.3016
115	0.1528	0.1816	0.2149	0.2373	0.3004
116	0.1522	0.1809	0.2139	0.2363	0.2991
117	0.1515	0.1801	0.2131	0.2353	0.2979
118	0.1509	0.1793	0.2122	0.2343	0.2967
119	0.1502	0.1786	0.2113	0.2333	0.2955
120	0.1496	0.1779	0.2104	0.2324	0.2943
121	0.1490	0.1771	0.2096	0.2315	0.2931
122	0.1484	0.1764	0.2087	0.2305	0.2920
123	0.1478	0.1757	0.2079	0.2296	0.2908
124	0.1472	0.1750	0.2071	0.2287	0.2897
125	0.1466	0.1743	0.2062	0.2278	0.2886
126	0.1460	0.1736	0.2054	0.2269	0.2875



## Lampiran 26 nilai tingkat signifikan F tabel

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

## Lampiran 27 Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Dana Kelurahan Data Tahun 2022

KODE	URAIAN	PAGU	LS - GAJI DAN TUNJANGAN			LS - BARANG DAN JASA			UP / GU / TU			JUMLAH SPJ	SISA ANGGARAN
			S.D 31 DES 2021	01 JAN 2022 S.D 31 DES 2022	S.D 31 DES 2022	S.D 31 DES 2021	01 JAN 2022 S.D 31 DES 2022	S.D 31 DES 2022	S.D 31 DES 2021	01 JAN 2022 S.D 31 DES 2022	S.D 31 DES 2022		
7.01.03.2.02.02-05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Data)	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	174.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.720.000,00	174.720.000,00	174.720.000,00	0,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	35.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280.000,00	35.280.000,00	35.280.000,00	0,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
7.01.03.2.02.03-05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Data)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

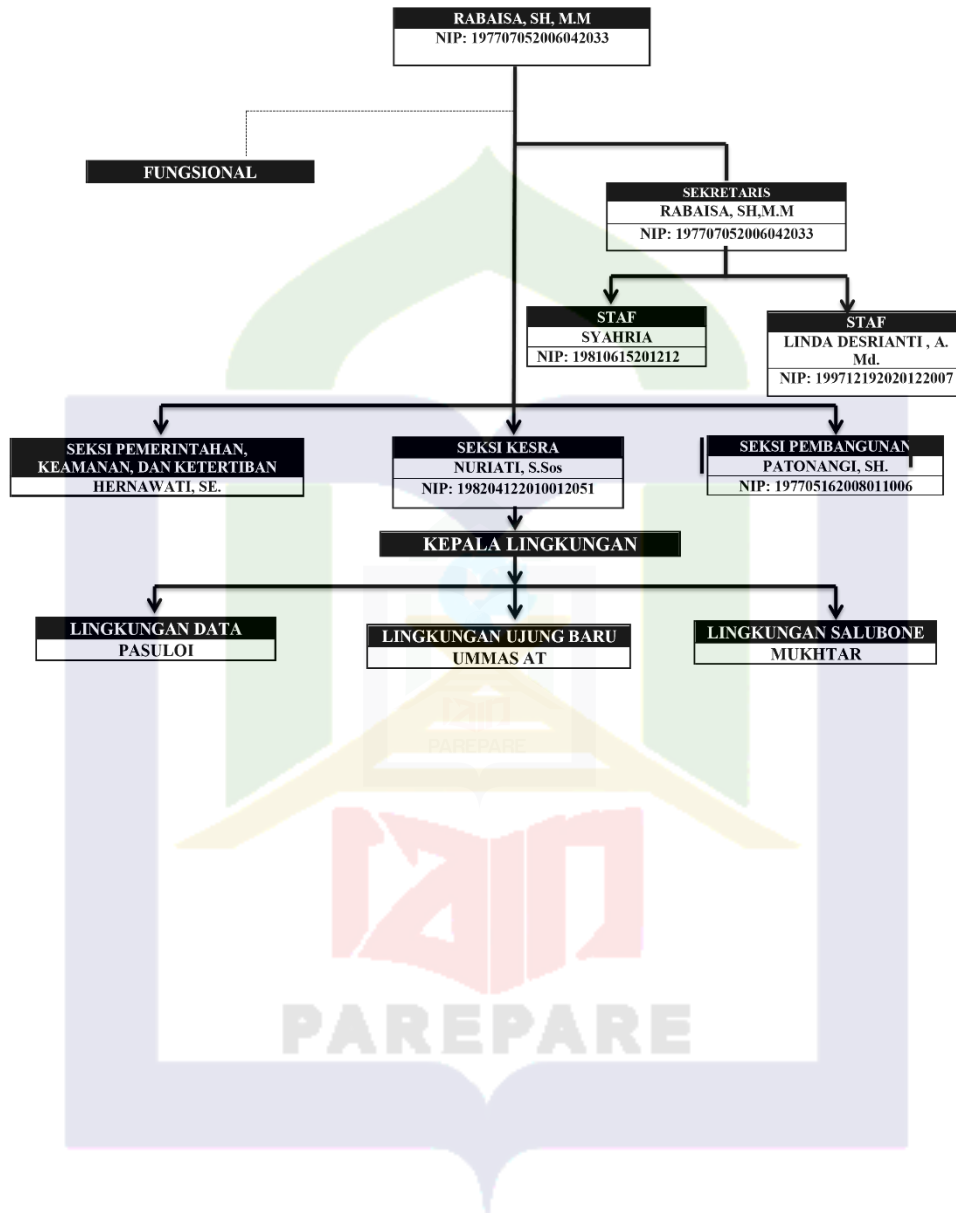
## Lampiran 28 Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Dana Kelurahan Data Tahun 2023

KODE	URAIAN	PAGU	LS - GAJI DAN TUNJANGAN			LS - BARANG DAN JASA			UP / GU / TU			JUMLAH SPJ	SISA ANGGARAN
			S.D 31 DES 2022	01 JAN 2023 S.D 31 DES 2023	S.D 31 DES 2023	S.D 31 DES 2022	01 JAN 2023 S.D 31 DES 2023	S.D 31 DES 2023	S.D 31 DES 2022	01 JAN 2023 S.D 31 DES 2023	S.D 31 DES 2023		
7.01.03.2.02.02-05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Data)	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
7.01.03.2.02.03-05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Data)	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00

## Lampiran 29 Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Dana Kelurahan Data Tahun 2024

KODE	URAIAN	PAGU	LS - GAJI DAN TUNJANGAN			LS - BARANG DAN JASA			UP / GU / TU			JUMLAH SPJ	SISA ANGGARAN
			S.D 31 DES 2023	01 JAN 2024 S.D 31 DES 2024	S.D 31 DES 2024	S.D 31 DES 2023	01 JAN 2024 S.D 31 DES 2024	S.D 31 DES 2024	S.D 31 DES 2023	01 JAN 2024 S.D 31 DES 2024	S.D 31 DES 2024		
7.01.03.2.02.0002-05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Data)	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0608	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.03.2.02.0003-05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Data)	15.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128.000,00	15.128.000,00	15.128.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.000,00	1.893.000,00	1.893.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00

Lampiran 30 Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang





Pengisian Kuesioner Pada Masyarakat dan Pegawai dan Masyarakat Kelurahan Data



## BIODATA PENULIS



Nurila Ramadani. U, lahir di Data pada tanggal 24 November 2001 merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ibu Hamriah dan Bapak Usman. Penulis beralamat di Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Adapun riwayat pendidikan penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 134 Data lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 5 Duampanua lulus pada tahun 2016, selanjutnya penulis menempuh Pendidikan di SMA Negeri 8 Pinrang lulus pada tahun 2019. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi islam yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Hingga tugas akhirnya pada tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah dengan judul *“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang”*.